

343.025
MAS
P 4



TESIS
PELAKSANAAN HAK ULAYAT ATAS TANAH
DI MINANGKABAU DEWASA INI
(Kajian Nagari Padang Gantiang Dan Nagari Tanjuang Sungayang di
Kabupaten Tanah Datar, Propinsi Sumatera Barat)

Program Studi
Magister Kenotariatan

oleh :
NASDION, SH
B4B001168

Tesis Dengan Judul Diatas Telah Dipertahankan
Di Depan Dewan Penguji Pada Tanggal 19 Desember 2003
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
2003

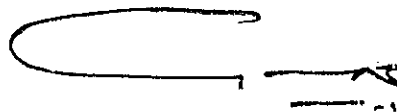
HALAMAN PENGESAHAN

**PELAKSANAAN HAL ULAYAT ATAS TANAH
DI MINANGKABAU DEWASA INI**
(Kajian Nagari Padang Gantiang dan Nagari Tanjuang Sungayang di
Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat)

Disusun Oleh :
NASDION, SH
NIM. B4B.001168

Tesis Dengan Judul tersebut diatas ini telah dipertahankan
Didepan Dewan Penguji pada tanggal 19 Desember 2003
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Disetujui
Dosen Pembimbing



Prof. IGN. Sugangga, SH

Mengetahui,
Ketua Program Magister Kenotariatan
Universitas Diponegoro



Prof. IGN. Sugangga, SH

**PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2003**

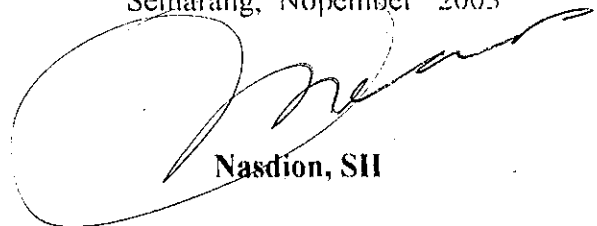
UPT-PUSTAK-UNDIP	
No. Daft:	2377/T/mn7/K1
Tgl.	8/3/04

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan lembaga pendidikan lainnya.

Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Nopember 2003



Nasdion, SH

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini dengan judul : **Pelaksanaan Hak Ulayat Atas Tanah di Minangkabau Dewasa Ini (Kajian Nagari Padang Gantiang dan Nagari Tanjuang Sungayang).**

Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang. Tidak ada yang sempurna di dunia ini, penulis sangat menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan, waktu, dan terbatasnya literatur. Namun dengan tekad dan rasa ingin tahu dalam pengembangan ilmu, maka penulis dapat menyelesaikannya, untuk itu penulis sangat mengharapkan dan berterima kasih apabila ada kritikan dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan tesis ini. Penulis sangat menyadari bahwa tesis ini juga dapat terselesaikan hanya dengan bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Untuk itu, maka penulis menyampaikan rasa hormat, penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Prof. I.G.N. Sugangga, SH, selaku Pembimbing, yang telah memberikan pengarahan, masukan-masukan dan kritik yang membangun selama proses penulisan tesis ini. integritas Beliau sebagai akademis dan figur “ayah” yang selama ini dirasakan oleh penulis telah memberikan kesan yang berarti bagi penulis.

Rasa terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang mendukung proses penyelesaian studi dan penelitian ini, antara lain kepada :

1. Bapak Prof. Ir. Eko Budihardjo, MSc selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. dr. Suharyo Hadisaputra, Sp, PD (K) selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
3. Bapak Prof. I.G.N. Sugangga, SH., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro dan Pembimbing dalam penulisan tesis ini.
4. Bapak R. Suharto, SH. M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
5. Ibu Hj. Sri Sudaryatmi, S.H., M.Hum selaku pereviewer pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
6. Bapak Sukirno, S.H., M.Si. selaku pereviewer pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
7. Ibu Budi Gutami, SH.MH, selaku Dosen Wali Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
8. Para Guru Besar dan Staff Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang secara Profesional memberikan ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan.

9. Rekan-rekan Mahasiswa Program Studi Kenotariatan Universitas Diponegoro Angkatan 2001 yang selalu Mendorong untuk menyelesaikan tesis ini dan setia menjadi mitra diskusi dalam mengikuti kuliah di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
10. Kepada semua responden sehingga tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian ini sejak awal sampai akhir penulisan tesis ini.

Terima kasih dari lubuk hati yang terdalam kepada Ibunda tercinta *Raya Wahab* dan Almarhum ayahanda *Drs. H. Chalidi Hasyim Dt. Lelo Basa Nan Basa*, yang telah memberikan dorongan moral dan nasehat yang tiada henti-hentinya kepada penulis selama mengikuti pendidikan.

Pada akhir terima kasih secara khusus sampaikan kepada istriku beserta anak-anakku, yang dengan ikhlas serta setia memberikan dukungan moril kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. dengan tulisan ini pula penulis berharap dapat memberikan setitik manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu kenotariatan.

Semarang, Nopember 2003

NASDION

ABSTRAK

PELAKSANAAN HAK ULAYAT ATAS TANAH DI MINANGKABAU DEWASA INI (Kajian Nagari Padang Gantiang dan Nagari Tanjung Sungayang di Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat).
Pembimbing : Prof. IGN. Sugangga, SH.

Dalam Negara Republik Indonesia yang susunan kehidupan masyarakatnya bercorak agraris, masalah pertanahan merupakan aspek kehidupan manusia. Keseimbangan antara keperluan tanah untuk kepentingan perorangan dan kepentingan masyarakat perlu diusahakan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Jika kita membicarakan masalah tanah Minangkabau, maka kita juga harus menghubungkannya dengan ketentuan hukum Adat Minangkabau. Hal ini karena tanah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hukum Adat Minangkabau, sebab tanah merupakan salah satu faktor yang mempersatukan orang Minangkabau. Dimanapun orang Minangkabau berada, mereka diikat oleh satu kesatuan hukum tanah.

Menurut Adat Minangkabau, struktur pemiliknya diatur secara tersendiri, pemiliknya adalah para anggota kaum itu sendiri, suku, dan Nagari secara bersama-sama yang berasal dari tanah hak ulayat. Jadi dapat dilihat disini bahwa fungsi tanah bagi masyarakat Minangkabau adalah untuk kepentingan sumber ekonomi yang digunakan secara bersama-sama. pada saat sekarang ini fungsi tanah tersebut telah mulai berkurang seiring dengan bergesernya nilai tatanan masyarakat, sumber ekonomi masyarakat Minangkabau itu sendiri. Sejauh manakah pengaruh dari pergeseran nilai tersebut terhadap pelaksanaan hak ulayat di Minangkabau dan apakah terjadi pertentangan antara pelaksanaan hak ulayat dengan ketentuan hukum tanah nasional, untuk itu penulis mengadakan penelitian dengan memakai metode penelitian yuridis empiris untuk mengetahui keadaan dan fakta yang terjadi di masyarakat Minangkabau dewasa ini dalam pelaksanaan hak ulayat atas tanah.

ABSTRACT

NASDION, Program of Postgraduate Magister Notariat, Diponegoro University. Arrangement of Land Customary Right For Land of Minangkabau according to Rule of Custom and the implementation in this time (Study of Nagari Padang Gantiang and Nagari Tanjuang Sungayang). Counsellor: Prof. IGN. Sugangga, SH.

In State Republic of Indonesia, which is formation of society life an agrarian pattern, problem of land represent human life aspect. The balances between need of land for the sake of individualness and importance of society require to be laboured in order to realizing prosperous and fair society.

If we are speaking about land of Minangkabau, we must connect it with rule of customary law of Minangkabau. This problem because land represents part of inseparable of customary law of Minangkabau, because land represents one of factor that is make unity of Minangkabau people. In everywhere Minangkabau people reside in, they bound by one factor unity of land law.

According to custom of Minangkabau, its owner structure is arranged separately. Its owner is by all clan member, tribe, and Nagari by together and that land is divided as clan customary right for land, tribe customary land right and customary land right of Nagari. Individual rights which had of land limited by society rights. It is can be seen here that function of customary land right to society of Minangkabau is to pertinent customary law society member common interest.

However it isn't this problem will become complicated if it is needed of land to importance of development because ownership of collectively. Rule of custom of Minangkabau do not hinder development in West Sumatra region. The important thing, which must be paid attention, is approach with landowner of customary land right. If there is agreement, hence society will give the land, which needed to utilize importance of development.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Kontribusi Penelitian	6
1.5. Kerangka Teoritis	
1.5.1. Pengertian Hak Ulayat dan Tanah Ulayat	7
1.5.2. Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah Ulayat	8
1.5.3. Konsep Penguasaan dan Kepemilikan Tanah Ulayat Menurut Hukum Adat Minangkabau	9
1.6. Sistematika Penulisan	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Tanah Ulayat dan Fungsinya Pada Masyarakat Minangkabau.....	17
2.2. Penguasaan dan Pengolahan Tanah Ulayat	25
2.3. Perbuatan Hukum yang Dapat Dilakukan Atas Tanah Ulayat	31
2.4. Struktur dan Sistem Kekerabatan Masyarakat Adat Minangkabau	40
2.5. Sistem Kewarisan Pada Masyarakat Minangkabau	52

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode Pendekatan	59
3.2. Spesifikasi Penelitian	59
3.3. Penentuan Populasi dan Sampel	60
3.4. Teknik Pengumpulan Data	61
3.5. Teknik Analisis	61

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Wilayah Penelitian	63
4.1.1. Nagari Padang Gantiang	65
4.1.2. Nagari Tanjuang Sungayang	68
4.2. Kedudukan dan Fungsi Tanah Ulayat	69
4.3. Penguasaan dan Pengolahannya	75
4.4. Perbuatan Hukum yang Dapat Dilakukan Atas Tanah Ulayat	82

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan	94
5.2. Saran	96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Daftar Nagari di Kabupaten Tanah Datar	64
2. Daftar Suku di Padang Gantiang	68
3. Daftar Suku Tanjuang Sungayang	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah tanah merupakan hal yang selalu menarik perhatian, keadaan ini antara lain disebabkan karena masalah tanah tersebut menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan manusia. Di negara-negara yang sedang berkembang, titik berat dari kehidupan dan penghidupan rakyat dititik beratkan pada sektor agraria, dan masalah pertanahan merupakan masalah utama yang harus dihadapi oleh negara-negara tersebut. Demikian pula halnya dengan negara kita ini yang sebagian besar penduduknya masih menggantungkan penghidupan serta penghasilannya pada usaha-usaha dibidang pertanahan. Kebutuhan tanah untuk keperluan pembangunan harus mendapat perhatian dalam rangka mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Karena itu harus diusahakan adanya keseimbangan antara keperluan tanah untuk kepentingan perorangan dan kepentingan masyarakat.

Minangkabau adalah suatu wilayah di Indonesia dimana dapat dijumpai masyarakat yang didasarkan pada tertib hukum ibu, atau yang sering disebut dengan sistim matrilineal. Menurut Ch. Winick, seperti yang dikutip oleh Soerjono Soekanto, yang disebut dengan prinsip garis keturunan matrilineal atau yang oleh beliau disebut

sebagai *matrilineal descent* yaitu : “Referring to the transmission authority, inheritance, or descent primarily through females”¹

Berbicara mengenai masalah tanah di Minangkabau berarti kita membicarakan pula masalah hukum adat Minangkabau. Hal ini disebabkan karena masalah tanah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hukum adat Minangkabau itu sendiri. Tanah ulayat sama tuanya dengan masyarakat hukum adat Minangkabau itu. Hubungan antara keduanya adalah hubungan yang tidak bisa dipisahkan, karena tanah merupakan salah satu faktor yang mempersatukan orang Minangkabau.

Demikian eratnya hubungan tersebut sehingga jika masyarakat hukum adat berubah maka hukum tanahnya akan berubah, dan hukum tanah itu akan tetap jika masyarakatnya tidak mengalami perubahan. Jadi dimanapun orang Minangkabau berada mereka diikat oleh satu faktor kesatuan hukum tanah.

Menurut adat Minangkabau, di bumi Minangkabau tidak terdapat sejengkal tanahpun yang tidak berpunya. Berapapun luasnya tanah tersebut tetap ada penguasanya, baik oleh suatu kaum sebagai hak ulayat, maupun oleh perorangan yang merupakan harta pencaharian. Akan tetapi tidak terlepas dari pengaruh kaum, dimana orang yang bersangkutan menjadi anggotanya. Kita sering mendengar bahwa masalah tanah sering menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah Sumatera Barat pada umumnya dan di daerah Kabupaten Tanah Datar khususnya, hal ini antara lain disebabkan karena adanya kesulitan dalam usaha mendapatkan tanah,

¹ Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, 1986, hal. 60.

karena masalah tanah tersebut banyak sangkut pautnya dengan seluk beluk hukum adat yang biasanya berkisar pada masalah-masalah ketidaksepakatan antara kerabat para pemilik tanah, masalah-masalah yang menyangkut besarnya ganti kerugian dan masalah-masalah dalam hukum adat yang berlaku di Minangkabau. Karena hal-hal inilah kemudian orang mengatakan bahwa hukum adat itu statis, kaku dan tidak bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan serta perubahan-perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Dengan mengemukakan pepatah adat Minangkabau yang berbunyi : "*indak lakang dek paneh dan indak lapuak dek hujan*" dimana hal ini ada benarnya jika pepatah tersebut diartikan atau ditafsirkan menurut kata-katanya saja. Untuk itu kita juga perlu memperhatikan pepatah lain yang berbunyi : "*sekali aie gadang sekali tepian beraliah*", yang artinya bahwa adat Minangkabau itu fleksibel dan sesuai dengan perkembangan, dengan kata lain adat tersebut dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan sosial yang timbul di dalam masyarakat. Jadi pepatah lama yang pertama dapat diartikan bahwa intisari dan tujuan murni hukum adat itu senantiasa dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat hukum yang mendukungnya. Dari sini kita dapat melihat dan menyimpulkan bahwa ketentuan adat Minangkabau tidak menghalangi pembangunan di daerah Kabupaten Tanah Datar khususnya, Propinsi Sumatrera Barat pada umumnya, dan jika selama ini terdapat kesulitan dalam mendapatkan tanah untuk pembangunan, maka hal ini hanyalah merupakan suatu akibat dari cara berpikir yang berkotak-kotak. Hal ini dapat mengakibatkan perubahan dalam perkembangan sistem nilai atau sikap mental yang dapat mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat di daerah ini, sehingga

membawa dampak terhadap kekompakan antara ninik mamak dan kemenakannya, antara ninik mamak-ninik mamak di dalam nagari maupun antara rakyat dan pemerintah. Apabila hal ini terjadi maka dapat kita pastikan pembangunan tidak akan bisa dilaksanakan, atau tegasnya tentu kita akan menemui kesulitan untuk dapat memanfaatkan tanah ulayat guna kepentingan pembangunan karena tidak adanya kesepakatan di dalam kaum.

Menurut ketentuan adat Minangkabau, hak yang tertinggi atas tanah adalah hak ulayat yang berlaku baik keluar maupun kedalam. Keluar artinya orang-orang yang bukan warga masyarakat hukum adat yang memiliki tanah tersebut tidak diperkenankan untuk mempergunakannya kecuali dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh masyarakat hukum yang bersangkutan. Sedangkan kedalam maksudnya adalah bahwa tiap-tiap anggota kaum, suku atau nagari mempunyai hak untuk menggunakan tanah ulayat itu menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh masyarakat hukum itu untuk kepentingan bersama mereka juga. Antara masyarakat dan tanah terjadi hubungan kejiwaan yang erat sekali. Hal itu bersumber pada pokok pikiran bahwa tanah adalah sumber hidup yang utama, yang memberikan kehidupan kepada manusia, sehingga terjadilah hubungan yang bersifat magis.

1.2 Perumusan Masalah

Walaupun hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi mengenai *Law in books*, tetapi juga dapat dipelajari dan diteliti sebagai studi mengenai *law in action* yang merupakan studi ilmu sosial yang non-doktrinal dan bersifat emperis, untuk mengimplementasikan hukum dalam kehidupan riil masyarakat, maka kita harus bisa merumuskan hukum dalam suatu bentuk kebijakan yang mencerminkan ciri dan karakter bangsa Indonesia yang bhineka, sehingga unifikasi hukum bukanlah sesuatu pengertian yang *an sich*, tetapi harus bisa disesuaikan dengan kultur dan karakter dimana hukum diterapkan.

Berdasarkan asumsi tersebut, maka peneliti mengangkat permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan hak ulayat atas tanah dewasa ini ?
2. Faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan hak ulayat atas tanah tersebut ?
3. Apakah terjadi konflik pelaksanaan hak ulayat atas tanah dengan ketentuan hukum positif ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan sekaligus berusaha untuk merumuskan pelaksanaan hak ulayat atas tanah di Minangkabau, agar tidak terjadi konflik dengan kebijakan Pemerintah secara Nasional, hal tersebut tidak lepas dari 2 (dua) pertanyaan, yaitu bagaimana hukum (baca : kebijakan hukum nasional) diaplikasikan dan atau dikomunikasikan dalam suatu komunitas masyarakat adat

sehingga tidak terjadi konflik dalam pelaksanaannya dan bagaimana respon komunitas masyarakat adat, jika hukum tersebut dihadapkan dengan hukum adat yang mereka anut.

Bertitik tolak dari asumsi tersebut di atas, adapun tujuan dari studi ini secara pragmatis adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan tanah hak ulayat atas tanah dewasa ini di Sumatera Barat ;
2. Mengetahui faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan hak ulayat atas tanah tersebut ;
3. Mengetahui apakah terjadi konflik antara hukum positif tentang tanah dengan hukum adat di Sumatera Barat.

1.4. Kontribusi Penelitian

Beranjak dari tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas, maka diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat atau kontribusi sebagai berikut :

1. Manfaat ilmiah, yaitu hasil penelitian ini akan dapat sumbangan ilmu pengetahuan dalam pengembangan Ilmu Hukum tentang masalah pengaturan tanah ulayat di Minangkabau dan dapat juga secara umum sebagai sumbangan bagi ilmu atau dapat merupakan sebagai bahan bacaan bagi pendidik dan dosen Hukum Adat.
2. Manfaat Praktis, dalam hal ini bermanfaat bagi pemecahan masalah dengan solusi yang tepat bila timbul konflik tentang pengaturan tanah ulayat di Minangkabau.

1.5 Kerangka Teoritis

1.5.1. Pengertian Hak Ulayat dan Tanah Ulayat

Sebutan yang dikenal dalam kepustakaan Hukum Adat adalah hak penguasaan yang tertinggi atas tanah dalam hukum adat, yang meliputi semua tanah yang termasuk lingkungan wilayah suatu masyarakat hukum adat tertentu yang merupakan tanah kepunyaan bersama para warganya.

Herman Sihombing, dalam tulisannya yang berjudul "Pendaftaran Tanah Ulayat", disajikan pada diskusi Pendaftaran Tanah melalui Proyek Ajudikasi di Batusangkar Sumatera Barat tanggal 2 Maret 2000 menyebutkan bahwa Ulayat bukanlah Hak, akan tetapi hubungan abadi yang dipunyai manusia-tanah masyarakat. Atas dasar hubungan ulayat itulah lahir hak atas tanah yang dipunyai, bukan lahir di atas ulayat akan tetapi diikat dan dibatasi oleh kekuasaan ulayat.

Menurut pengertian Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.5 tahun 1999, hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat Hukum Adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil mamfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan bathiniah turun menurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. Sedangkan yang dimaksud dengan tanah ulayat adalah bidang tanah yang diatasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu.

1.5. 2. Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah Ulayat

Pengertian penguasaan dan menguasai dapat dipakai dalam arti fisik, juga dalam arti yuridis. Penguasaan yuridis dilandasi hak, yang dilindungi oleh hukum dan umumnya memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki. Tetapi ada penguasaan Yuridis yang biarpun memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang dihaki secara fisik, pada kenyataan penguasaan fisik dilakukan oleh pihak lain. Misalnya kalau tanah yang dimiliki disewakan, digadaikan kepada pihak lain dan penyewa atau penerima gadai menguasainya secara fisik.

Dalam hukum pertanahan dikenal juga penguasaan yuridis yang tidak memberikan kewenangan untuk menguasai tanah yang bersangkutan secara fisik. Kreditur pemegang hak jaminan atas tanah mempunyai hak penguasaan yuridis atas tanah yang dijadikan jaminan, tetapi penguasaan secara fisik tetap ada pada yang mempunyai tanah.

Pengertian penguasaan dan menguasai di atas dipakai dalam arti perdata, sedangkan dalam UUPA pengertian dikuasai dan menguasai dipakai dalam arti publik, sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 2 UUPA “atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

Di dalam UUPA misalnya diatur dan sekaligus ditetapkan tata jenjang atau hirarki hak-hak penguasaan atas tanah yaitu :

- a. Hak bangsa Indonesia yang disebut dalam Pasal 1, sebagai hak penguasaan atas tanah yang tertinggi, beraspek perdata dan publik.
- b. Hak menguasai dari negara yang disebut dalam Pasal 2, semata-mata bersifat publik.
- c. Hak-hak perorangan/individu (hak-hak atas tanah/hak jaminan).
- d. Hak ulayat masyarakat hukum adat yang disebut dalam Pasal 3 yang bersifat perdata dan publik yang menyebutkan : “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan Nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi”.

1.5.3. Konsep Penguasaan dan Kepemilikan Tanah Ulayat Menurut Hukum Adat Minangkabau

Bicara mengenai penguasaan tanah, maka juga sekaligus terkandung aspek pengakuan, dan seterusnya kita tidak terlepas berbicara mengenai “*subyek*” dan “*Obyek*” yang harus diakui dan ada pihak yang mengakuinya. Subyek yang harus diakui sudah tentu adalah pihak-pihak yang menjadi pendukung hak dan kewajiban atas tanah ulayat, sedangkan obyeknya sendiri adalah tanah ulayat. Pihak yang

mengakui dapat dilihat dari dua sisi yaitu pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dalam mengakui keberadaan subyek dan obyek tidak terlepas dari khasanah peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif), sedangkan masyarakat mengakui subyek dan obyek hak juga tidak terlepas dari hukum yang hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat itu sendiri.²

Pengakuan terhadap subyek dan obyek hak atas tanah ulayat tidak terlepas dari "*Political Will*" pemerintah yang berkuasa, meskipun Pasal 18 UUD 1945 menegaskan bahwa :

"Pembangunan daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang. Dengan memandang dan mengingat dasar pemusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa".

Bunyi pasal tersebut di atas dapat diartikan bahwa UUD 1945 mengakui keberadaan "kesatuan dari masyarakat hukum adat", yang bersumber dari sistem budaya berbagai kelompok masyarakat yang tercakup dalam teritorial negara Republik Indonesia. Pengakuan ini tidak hanya terbatas pada aspek eksistensi lembaganya saja, tetapi juga aspek struktur, mekanisme, peraturan-peraturannya, serta mengenai hak dan kewajiban yang terkandung dalam sistim kelembagaan tersebut.

² Hermayulis, *Penerapan Hukum Pertanahan dan Pengaruhnya Thread Hubungan Kekerabatan pada Sistem Kekerabatan Matrilineal Minangkabau di Sumatra Barat*, Disertasi, UI, Jakarta, 1999, hal. : 194 –195.

Lebih lanjut mengenai pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat dapat kita lihat dalam politik penyusunan Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) sebagai implementasi dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang didasarkan pada hukum adat.

Di Minangkabau ini tidak ada tanah yang tak mempunya mulai dari gunung bukit, lembah, dan pesisir pantai telah ada pemiliknya.

Di lihat dari faktor geneologis penguasaan dan kepemilikan tanah di Minangkabau dapat digolongkan atas dua, yaitu *pertama*, tanah berstatus *Pusaka Tinggi*, *kedua*, tanah dengan status *Pusaka Rendah*. Tanah Pusaka Tinggi ini tidak boleh dipindahtangankan dari satu *suku* ke suku lain atau dari *kaum* yang satu kepada kaum yang lain, dan yang berhak mewarisi tidak pernah putus, dan selalu dilakukan secara turun temurun dari mamak kepada kemenakan. Harta pusaka tinggi ini kepunyaan kaum dan dipunyai secara bersama-sama oleh semua anggota kaum, semua berhak atas harta itu. Tanah harta pusaka tinggi ini diawasi oleh **Mamak Kepala Waris** dan dipelihara oleh **Penghulu**.

Harta pusaka rendah ini adalah harta berupa tanah yang didapat dari *pewarisan harta pencaharian* atau *cancang latiah* dan taruko(mengolah tanah kosong atau resnulus) yang dilakukan oleh mamak. Harta yang termasuk kelompok ini adalah harta yang baru *mengalami pewarisan dibawah tiga tingkatan generasi*. Harta pencaharian (*self earned property*) akan menjadi harta pusaka tinggi bila telah diwariskan sampai tiga generasi ke atas. Sedangkan harta cancang latiah diantaranya didapat dari hasil usaha dirantau. Dari kedua pengelompokan harta pusaka di atas

terlihat bahwa Mamak Kepala Waris dan Penghulu mempunyai wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan menjaga keutuhan dan bahkan berusaha untuk menambahkannya.

Bahwa kedua bentuk harta tersebut penguasaannya dan pemanfaatannya dilaksanakan secara kolektif, yaitu :

Pada tingkat Suku dikuasai dan dimanfaatkan oleh semua anggota suku secara turun temurun di bawah pengawasan penghulu pucuk arau penghulu andiko, *tingkat kaum*, dikuasai dan dimanfaatkan oleh seluruh anggota kaum secara turun temurun di bawah pengawasan Mamak Kepala Waris, dan *pada tingkat paruik*, dikuasai dan dimanfaatkan seluruhnya oleh anggota paruik, juga di bawah pengawasan mamak kepala waris, serta *pada tingkat keluarga inti*, harta berupa tanah dikuasai dan dimanfaatkan hanya oleh keluarga yang merupakan salah satu bahagian dari paruik, karena telah ada *ganggam bauntuak pagang bamasiang*, dan penguasaan dan pemanfaatannya hanya *diperuntukan atau dilakukan oleh pihak perempuan* di bawah pengawasan mamak kepala waris.

Bahwa dari seluruh bentuk harta pusaka yang berbentuk tanah tersebut bersumber atau berasal dari hak ulayat, hasil garapan masyarakat adat yang mengatasnamakan suku, atau mengatasnamakan kaum, kalau menggarap tanah ulayat mengatasnamakan kaum menjadi harta pusaka kaum, dan kalau mengatasnamakan suku menjadi harta pusaka suku.

Tanah ulayat yang digarap tersebut adalah tanah Ulayat nagari dimana suku atau kaum itu bermukim, atau dibatasi oleh batas teritorial nagari.

Dengan demikian deskripsi singkat di atas, jelaslah bagaimana falsafah pelaksanaan hak ulayat atas tanah dan penguasaan serta pemanfaatannya oleh masyarakat adat sesuai dengan stratanya masing-masing.

Selanjutnya untuk mendukung penulisan ini dapat menggunakan teori-teori sosial yang ada. Teori-teori sosial ini akan diformulasikan dengan fakta-fakta sosial yang selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam penulisan tesis ini.

Sesuai dengan pandangan Weber yang menempatkan fakta sosial non hukum sebagai independen variabel. Yaitu memahami hukum sebagai mekanisme kontrol sosial dan dilihat dari perspektif antropologi, hukum merupakan aktifitas kebudayaan yang berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial, atau sarana untuk menjaga keteraturan sosial dalam masyarakat. Hukum bukan merupakan suatu institusi yang bersifat otonom, atau terlepas dari aspek-aspek kebudayaan yang lain, seperti politik, ekonomi, regelius dan lain-lain, tetapi menjadi bagian yang integral dari suatu kebudayaan.

Untuk mengetahui seberapa jauh hukum adat yang lebih bersifat *self regulation* mampu beradaptasi dengan hukum nasional, maka kita dapat menganalisanya dengan menggunakan teori : "*Semi Autonomous Social Field*" dari Sally Falk Moore.³ Teori ini mendiskripsikan, bahwa hukum adat itu tidak bersifat otonom, pada saat hukum adat itu dihadapkan dengan hukum positif. Malahan justru diupayakan bagaimana mewujudkan suatu konformitas antara hukum adat yang diyakini

³ Moore, 1978, hal. 65-69.

masyarakat hukum adat dengan hukum positif. Dari hasil proses konformasi ini akan terlihat eksistensi hukum adat ditengah-tengah hukum positif.

Disisi lain, untuk mengetahui arti atau makna dari suatu tindakan yang diambil oleh masyarakat hukum adat, dapat kita gunakan perspektif teori interaksionisme Simbolik. Menurut Blumer penerapan teori ini dilakukan dengan menggunakan bahasa sebagai satu-satunya simbol yang terpenting dan melalui isyarat. Simbol bukan merupakan fakta-fakta yang sudah jadi, simbol berada dalam proses yang berkesinambungan. Proses penyampaian makna inilah yang merupakan subyek matter dari sejumlah analisa kaum interaksionalisme simbolik.⁴

Lebih lanjut Blumer menekankan bahwa interaksionalisme simbolik ini berdasarkan pada tiga premis, yaitu :⁵

- a. Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan “makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka”
- b. Makna tersebut berasal dari “interaksi sosial seseorang dengan orang lain”
- c. Makna-makna tersebut disempurnakan pada saat proses interaksi sosial berlangsung”.

Makna pada dasarnya merupakan interpretasi yang diberikan seseorang atas suatu obyek. Dalam suatu tindakan, maka makna atas obyek dipakai sebagai instrumen yang mengarahkan dan membentuk suatu tindakan tertentu.⁶ Menurut

⁴ Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hal. 260-261.

⁵ *Ibid*, hal. 261.

⁶ *Ibid*, hal. 263.

teori ini kehidupan bermasyarakat terbentuk melalui proses interaksi dan komunikasi antara individu dan antara kelompok dengan menggunakan simbol-simbol yang dipahami maknanya melalui empiris.

1.6 Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab yang terdiri dari hal-hai sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan, terdiri dari 6 (enam) sub bab yaitu latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, dan sistematika penulisan.

Latar belakang berisi alasan penulis memilih penelitian tentang masalah pelaksanaan hak ulayat atas tanah di Minangkabau. Tujuan dan manfaat penelitian menguraikan kerangka atau sistematika penulis yang terdiri dari 5 (lima) bab yaitu : Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Metoda Penelitian, Hasil Penelitian dan Pembahasan serta Kesimpulan dan Saran.

Bab II berisi Tinjauan Pustaka yang terdiri dari 5 (lima) sub bab, yaitu pengertian tanah ulayat dan fungsinya tanah pada masyarakat Minangkabau, penguasaan dan pengolahan tanah ulayat, perbuatan hukum yang dapat dilakukan atas tanah ulayat, struktur dan sistem kekerabatan masyarakat adat Minangkabau, dan sistem kewarisan pada masyarakat Minangkabau.

Bab III berisi Metode Penelitian terdiri dari 5 (lima) sub bab yaitu : Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Populasi dan Sampling, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis.

Bab IV berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan hasil dari penelitian yang didapat dari data primer maupun sekunder tersebut dirangkum dalam 3 (tiga) sub bab yaitu : Gambaran umum mengenai daerah penelitian, bagaimana perkembangan pengaturan tanah ulayat di daerah Kabupaten Tanah Datar, dan faktor yang mempengaruhinya.

Bab V berisi Kesimpulan dan Saran, kesimpulan memuat hasil dari Bab I sampai Bab IV sedangkan saran berisi pendapat penulis dari penelitian tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Tanah Ulayat dan Fungsinya Pada Masyarakat Minangkabau

Semenjak dahulu sampai sekarang tanah merupakan bagian dari alam yang mempunyai posisi penting di dalam kehidupan manusia. Dilihat dari segi penggunaannya secara umum tanah dapat dibedakan atas : tanah sebagai daerah pertanian dan tanah untuk lokasi pembangunan fisik. Di daerah Sumatera Barat kalau dilihat dari struktur pemilikannya tanah mempunyai bentuk tersendiri. Ada tanah negara, ada tanah ulayat dan ada tanah pribadi atau tanah milik perorangan. Dalam penulisan tesis ini pembahasannya dibatasi hanya mengenai tanah ulayat Minangkabau yang terdapat di wilayah Sumatera Barat.

Bila kita meninjau pengertian tanah ulayat, maka kita harus meninjau terlebih dahulu arti antara tanah dan ulayat. Sebagaimana diketahui, tanah mempunyai kedudukan yang penting bagi manusia. Setiap orang dapat merasakan betapa pentingnya kegunaan tanah bagi manusia, antara lain dapat digunakan untuk tempat tinggal, tempat bercocok tanam, tempat pekuburan dan lain sebagainya. Pendek kata tanah sangat erat hubungannya dengan kepentingan manusia pada umumnya. Sedangkan pengertian ulayat (wilayah, territorium) adalah merupakan suatu lingkungan dari suatu masyarakat seketurunan. Hubungan antara tanah dan ulayat adalah suatu hubungan dari lingkungan tanah yang dikuasai oleh masyarakat yang seketurunan secara turun temurun. Jadi secara umum apa yang dimaksud dengan

tanah ulayat tidak lain dari tanah milik bersama (*communal-heritage*). Menurut Herman Sihombing di Padang, bahwa secara historis tanah ulayat adalah seluruh tanah yang berada dalam kekuasaan suku, baik yang sedang dipakai dan dikerjakan maupun yang belum digarap. Pengertian tanah ulayat yang semula adalah tanah cadangan (*reserve*) untuk anak kemenakan dikemudian hari. Pengertian tanah ulayat yang dianut oleh masyarakat hukum adat yang sekarang berbeda, karena mereka menyebut sawah, ladang, empang, tebat yang mereka kerjakan juga sebagai ulayat. Jika ditinjau pengertian dari hak ulayat sebenarnya pengertian yang dianut oleh masyarakat hukum adat itu tidak sepenuhnya salah, karena hak ulayat itu berarti juga hak kepunyaan. Beliau mengatakan bahwa sebenarnya istilah yang lebih tepat adalah hak ulayat, bukan *beschikkingrecht*. Pengertian *beschikkingrecht* tidak menunjukkan hak ulayat menurut adat, karena maksudnya adalah menguasai. Maksud menguasai disini tidak jelas, karena menguasai itu bisa dilakukan dengan hak pakai, hak sewa, hak milik, hak bagi hasil, dan lain-lainnya. Jadi pengertiannya tidak jelas dan bersifat individualistis. Dalam perkembangan selanjutnya suku menjadi semakin banyak, sehingga tanah ulayat-pun turut terbagi dan dibagi pemakaian atau peruntukannya, sehingga semakin lama tanah-tanah tersebut semakin banyak yang diusahakan dan semakin sedikit yang belum diusahakan.

Kemudian dalam perkembangannya, kaum-kaum yang tergabung dalam suku semakin luas dan besar, sehingga di dalam kaum tersebut semakin kuat dan ketat peruntukkan atas tanah masyarakat hukum adat disebut sebagai *ganggam bauntuak*. Sedangkan tanah-tanah ulayat yang belum dibagi peruntukannya dinyatakan sebagai

tanah cadangan atau tanah reserve bagi anak kemenakan di kemudian hari. Sebenarnya tanah reserve inilah yang merupakan tanah ulayat yang pemeliharaannya dipegang oleh para penghulu atau kepala-kepala adat. Jadi pada hakekatnya yang merupakan tanah atau hak ulayat tersebut sebenarnya adalah :

- a. Hak kepunyaan bersama masyarakat hukum adat sebagai kebulatan seluruh warganya
- b. Hak terkuat masyarakat hukum adat atas tanah, air dan udara dalam lingkungan wilayah kekuasaannya, yang pada dasarnya tidak dapat dikurangi atau dipindahkan.
- c. Hak yang memberikan wewenang dan tugas kepada masyarakat hukum adat untuk melakukan usaha dan mengatur segala sesuatu mengenai tanah (air dan udara) dalam hubungannya dengan manusia, untuk kepentingan umum, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup segenap warga masyarakat.

Dari pengertian-pengertian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa tanah atau hak ulayat adalah hak yang dimiliki oleh suatu masyarakat hukum adat atas tanah serta apa yang terdapat di atasnya. Jadi subyeknya adalah masyarakat hukum yang terdiri dari semua warga masyarakat tersebut. Dengan demikian berarti hak ulayat ini adalah kepunyaan bersama dan penggunaannya diatur oleh kepala masyarakat hukum yang bersangkutan.

Subyek dari hak ulayat adalah masyarakat hukum adat baik yang tunggal (Persekutuan Desa atau Nagari) atau yang bertingkat (Perserikatan Desa atau Marga) yang berisi hak dan kewajiban, tetapi bukan merupakan hak dan kewajiban individu

melainkan hak dan kewajiban communal atau kaum. Contohnya hak masyarakat hukum di Minangkabau.

Adapun yang menjadi obyek dari hak ulayat adalah sebagai berikut :

- a. Tanah atau daratan, sebagai ruang lingkup hidup dan kehidupan masyarakat hukum adat
- b. Air atau perairan, seperti irigasi, sungai, danau dan sebagainya.
- c. Tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar, yang merupakan kayu bakar, rotan, buah-buahan dan sebagainya.
- d. Binatang-binatang yang hidup secara liar di hutan-hutan, termasuk sarang burung layang-layang.
- e. Kerak bumi, misalnya mengambil kerikil di sungai, batu kapur dan sebagainya.

Jadi yang termasuk obyek dari hak ulayat adalah tanah dan apa yang terdapat di atasnya serta apa saja yang terkandung di dalam tanah tersebut.

Menurut kenyataan yang ada, tanah ulayat yang terdapat di Sumatera Barat dapat kita bedakan ke dalam tiga golongan besar yaitu :

- a. Tanah Ulayat Kaum
- b. Tanah Ulayat Suku
- c. Tanah Ulayat Nagari

Yang dimaksud dengan tanah ulayat kaum adalah tanah-tanah yang dikelola oleh kaum. Kaum adalah gabungan dari beberapa peruk yang berasal dari satu nenek. Kaum ini dipimpin oleh seorang laki-laki tertua atau dituakan atas kesepakatan seluruh anggota kaum. Laki-laki tersebut disebut sebagai mamak kepala waris. Tanah

ulayat kaum hanya boleh dipergunakan oleh para anggota kaum yang dalam pelaksanaannya diawasi oleh mamak kepala waris.

Tanah ulayat suku adalah tanah-tanah yang dikelola oleh anggota-anggota suku. Suku adalah gabungan dari beberapa kaum, dimana pertalian yang mengikat suku hanyalah pertalian darah menurut garis ibu. Suku sama sekali tidak terikat pada suatu daerah tertentu, dimana saja anggota suku berada, mereka tetap merasakan pertalian darah dengan segenap saudara-saudara mereka yang sesuku. Setiap suku dipimpin oleh seorang penghulu suku. Yang berhak untuk menggunakan tanah ulayat suku adalah para anggota suku yang dalam pelaksanaannya diawasi oleh penghulu suku.

Sedang tanah ulayat nagari adalah hutan-hutan maupun tanah-tanah yang berada dalam pengelolaan nagari. Nagari merupakan gabungan dari beberapa suku yang menempati suatu wilayah tertentu. Jadi dapat kita lihat disini bahwa nagari merupakan masyarakat hukum yang berdasarkan faktor genealogis dan faktor teritorial. Pada umumnya dalam nagari dijumpai sedikit-dikitnya empat buah suku dan sebuah nagari dipimpin oleh seorang kepala nagari. Biasanya tanah ulayat nagari ini dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat umum, seperti untuk pembangunan masjid, pembuatan balai adat dan sebagainya.

Dalam perpustakaan lama apa yang dimaksud dengan hak ulayat adalah hak dan kewajiban masyarakat hukum terhadap tanah. Ciri-cirinya adalah bahwa hak ulayat itu berlaku keluar dan kedalam, serta hak ulayat itu tidak bisa dipindah tangankan.

Berlaku keluar artinya adalah orang yang tidak termasuk anggota dari masyarakat hukum yang memiliki hak ulayat tersebut, dilarang untuk menggunakan dan mengambil hasil keuntungan atas tanah tersebut. Untuk dapat menggunakan dan mengambil hasil keuntungan dari tanah tersebut maka harus terlebih dahulu dimintakan izin dari anggota persekutuan atau kepada persekutuan. Dengan jalan membayar uang pengakuan atau mengisi sepanjang adat menentukan. Tanah yang telah mendapatkan izin untuk dikerjakan itu diberi jangka waktu tertentu. Apabila di atas tanah tersebut ditanami dengan tanaman muda maka untuk tanaman muda yang ditanam tersebut tidak diadakan pembagian hasil. Tetapi jika di atas tanah tersebut ditanami dengan tanaman keras, maka diadakan pembagian hasil antar masyarakat hukum dengan orang yang mengerjakan tanah tersebut. Pembagian yang biasanya dilakukan adalah satu berbanding satu. Apabila tanah yang dikerjakan tersebut adalah tanah ulayat nagari, maka nagari akan memanfaatkan hasil tersebut untuk balairung adat dan masjid. Seandainya tanah tersebut tidak dipergunakan lagi, maka penguasaan atas tanah tersebut akan kembali kepada nagari yang memiliki hak ulayat tersebut. Apabila di atas tanah ulayat tersebut terjadi delik-delik yang berat seperti pembunuhan, sedangkan si pelakunya tidak diketahui dan korban meninggal dunia bukanlah anggota keluarga yang mempunyai ulayat, maka tanggung jawab ada pada masyarakat dan dalam hal ini untuk menjaga keseimbangan atau permusuhan maka diadakanlah pembayaran menurut adat.

Berlaku kedalam artinya adalah memberikan hak untuk memungut hasil kepada seluruh anggota masyarakat yang mempunyai ulayat. Misalnya atas tumbuh-

tumbuhan yang hidup di atas tanah tersebut ataupun untuk mengelola tanah itu untuk sawah dan ladang dan sebagai tempat untuk melakukan perburuan binatang liar.

Pada dasarnya tanah ulayat berfungsi bagi kesejahteraan anak kemenakan dari pemilik ulayat. Bagi warga yang memungut hasil dari tanah ulayat harus mengisi adat kepada masyarakat, dalam arti harus dikeluarkan hasilnya untuk kepentingan suku atau nagari sebagai masyarakat hukumnya. Penggunaan tanah ulayat untuk tujuan membuat persawahan baru maka si pembuat harus mendapat persetujuan dan mufakat suku sebagai masyarakat hukum yang mempunyai ulayat tersebut.

Hak-hak perorangan yang sudah dipunyai atas tanah tetap dibatasi oleh hak masyarakat. Kemungkinan hak perorangan itu berpindah seperti penjualan, gadai dan pewarisan harus ada persetujuan dari kepala masyarakat, seperti penghulu keempat suku jika suatu nagari terdiri dari empat suku. Masyarakat yang mempunyai hak ulayat dengan kesepakatan bersama menetapkan sebagian dari tanah ulayat dipergunakan untuk kepentingan umum atau kepentingan bersama. Misalnya untuk pembangunan masjid, balairung adat, sekolah, tempat pemakaman, dan tempat-tempat untuk melakukan perburuan binatang. Hal seperti itu dapat terjadi karena pada dasarnya tanah ulayat itu berfungsi bagi kepentingan bersama dari masyarakat hukum adat. Adanya ketentuan-ketentuan tersebut demi menjaga harta pusaka itu sendiri sehingga tidak terjadi penyalahgunaan. Bahkan dalam hukum adat ditentukan agar jangan sampai habis apa yang telah diwarisi dan kalau dapat ditolong untuk ditambah jumlahnya.

Hubungan hukum yang terjadi antar masyarakat hukum adat dengan tanah sangat erat sekali. Hubungan tersebut bukan yang bersifat yuridis semata akan tetapi juga menunjukkan hubungan yang bersifat magis religius.

Keistimewaan dari hak ulayat itu adalah adanya daya timbal balik antara hak masyarakat dengan hak perorangan atas tanah. Hal ini dapat dilihat apabila seseorang anggota masyarakat dengan jalan pengolahan, akan memperkuat hubungannya dengan bagian tertentu dari lingkungan ulayat itu, sehingga akan semakin intensiflah hubungan hukum perorangannya, dan semakin susutlah hak masyarakat terhadap tanah itu. Tetapi apabila tanah itu disia-siakan terus menerus, maka hak ulayat seperti sebelum adanya hak perorangan terhadap tanah itu.

Yang penting untuk dikemukakan disini bahwa dalam hak ulayat tersebut tersimpul suatu hak, bahwa kegunaan dari hak ulayat tersebut adalah untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat hukum itu. Faedah yang terbesar dari tanah ulayat adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan kaum wanita. Jika si suami pergi merantau, maka kaum wanita dan anaknya tidak menjadi terlantar karena ada jaminan tanah sehingga dapat membiayai kehidupannya sehari-hari serta dapat menyekolahkan anak-anaknya. Antara tanah ulayat dengan masyarakat hukum terdapat hubungan sosial ekonomis, yaitu suatu pertanggungjawaban bersama dari suatu kaum atau nagari atas keselamatan semua anggota kaum atau semua warga nagari yang bersangkutan.

2.2. Penguasaan dan Pengolaan Tanah Ulayat

Berbicara mengenai penggunaan tanah ulayat di Minangkabau maka penggunaannya bertujuan untuk kesejahteraan bersama anak kemenakan dan adatnya. Yang berkuasa atas tanah ulayat adalah mamak, tetapi yang mengurus tanah tersebut adalah wanita, karena hasil dari tanah tersebut tidak dibawa ke rumah istri mamak, akan tetapi dibawa ke rumah kemenakan yang wanita. Untuk menghormati hukum adat, maka hukum yang berlaku atas tanah ulayat adalah hukum adat yang diakui oleh pemerintah. Hak atas tanah ulayat ada pada masyarakat hukum adat baik yang merupakan masyarakat hukum adat kaum, suku maupun nagari. Jadi bisa kita lihat disini tidak terdapat hak milik individu. Hak perorangan yang ada di atas tanah ulayat itu hanyalah sebatas hak pakai saja. Perorangan tidak boleh mempunyai hak milik atas tanah ulayat, karena hak milik tersebut ada pada seluruh anggota masyarakat hukum adat.

Dari ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan di atas maka jelaslah kiranya bahwa batas kekuasaan masyarakat hukum adat, atau tegasnya para anak kemenakan terhadap tanah ulayat adalah terbatas sebagai pemegang hak pakai saja. Hak tersebut biasa dikenal dalam masyarakat hukum adat sebagai *ganggam bauntuak pagang bamasing*. Artinya, masing-masing tanah tersebut diperuntukkan bagi orang-orang yang telah ditentukan sebagai pemegang. Tetapi walaupun mereka hanya merupakan pemegang saja, mengenai hasil dari tanah tersebut mereka mempunyai hak sepenuhnya untuk mempergunakannya bagi kepentingan sendiri dan keluarganya. Yang tidak dapat dilupakan disini adalah adanya kewajiban mereka sebagai

pemegang tanah untuk memberikan sebagian dari hasil tanah tersebut kepada mamak kepala waris. Hasil tersebut dipergunakan untuk kepentingan seluruh anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Apabila kita berbicara mengenai penguasaan atas tanah ulayat itu maka hal tersebut harus kita bedakan menjadi :

- a. Tanah-tanah ulayat yang sudah digarap
- b. Tanah-tanah ulayat yang belum digarap

Pada tanah-tanah ulayat yang sudah digarap, masyarakat hukum adat baik itu yang berupa kaum, suku atau nagari sudah mempunyai kekuasaan langsung atas tanah ulayat. Artinya disini adalah bahwa kaum, suku, atau nagari melalui mamak atau penghulunya mempunyai hak untuk mengurus tanah ulayat dalam pengaturan peruntukannya serta mengawasi kelangsungan dari hak ulayat tersebut.

Pada tanah-tanah ulayat yang belum digarap tampaknya masyarakat hukum yang bersangkutan atau para penghulunya tidak mempunyai kekuasaan, walaupun sebenarnya para penghulu mempunyai kekuasaan atas tanah ulayat tersebut. Kekuasaan itu baru terlihat apabila ada anggota masyarakat ataupun pihak ketiga yang akan menggunakan atau menggarap tanah tersebut. Pada keadaan yang dapat dilihat dewasa ini tanah ulayat yang belum digarap hanya terdapat di kanagarian saja.

Dalam kenyataannya tidak semua tanah ulayat digarap oleh anggota masyarakat hukumnya, karena memang tidak semua tanah bisa digarap. Mengenai izin dan peruntukannya ditentukan oleh mamak kepala waris dengan memperhatikan keadaan para anak kemenakannya. Pemberian izin menggarap atau tegasnya

pemberian ganggam bauntuak pagang bamasiang kepada anak kemenakan, adalah berdasarkan kebutuhan kemenakan itu sendiri atas tanah garapan, dengan maksud untuk diolah atau dikerjakan baik untuk ladang maupun untuk dikerjakan sebagai sawah. Biasanya penggarapan itu dilaksanakan secara terus menerus. Sampai berapa lama tanah itu boleh dikerjakan tidak ada ketentuan yang pasti, tergantung kepada keadaan dan kebutuhan saja. Jika anak kemenakan yang mengerjakan tanah itu lalai dalam melaksanakan tugasnya, maka mamak kepala waris dapat menunjuk anak kemenakannya yang lain untuk menggarap tanah ulayat yang telah diterlantarkan oleh penggarapnya tadi.

Seandainya orang yang berasal dari luar masyarakat hukum adat tersebut akan mempergunakan tanah tersebut untuk membuka perladangan, atau mendirikan perumahan dengan maksud akan menetap disana maka ia harus meminta izin terlebih dahulu. Mula-mula orang pendatang tersebut harus menyatakan maksud kedatangannya kepada pemilik tanah yang bersangkutan. Kemudian memohon untuk diberikan sebidang tanah sekedar untuk penghidupannya beserta keluarganya. Setelah mendapat persetujuan dari pemilik tanah, maka orang yang berasal dari luar tersebut haruslah terlebih dahulu menyatukan diri dengan anak nagari setempat. Dengan lain perkataan pendatang tersebut bersama keluarganya harus menjadi anak nagari dari daerah tempat ia meminta tanah tersebut. Permintaan tersebut biasanya akan dimusyawarahkan oleh para anggota kaum dalam suatu rapat kaum. Apabila hal ini disepakati serta didapat izin dari seluruh anggota keluarga kaum yang bersangkutan, maka hal tersebut akan diputuskan saja oleh penghulu yang bersangkutan. Untuk

menjadi anak nagari setempat maka pendatang tersebut harus menjadi anak kemenakan dari pemilik tanah ulayat yang bersangkutan. Syaratnya adalah harus memakai suku asalnya, kecuali jika memang sukunya sama dengan suku dimana ia mengaku mamak. Misal jika pendatang tersebut sukunya Koto, sedangkan pihak yang mengakuinya bersuku Chaniago. Pendatang itu harus bermamak kepada suku Chaniago, akan tetapi suku dari orang yang bersangkutan tetap Koto. Tetapi hal tersebut hanyalah persoalan kedua, karena yang paling penting disini pendatang tersebut adalah meminta sawah dan tanah untuk perumahannya. Pengangkatan menjadi anak kemenakan harus dilakukan dengan melaksanakan suatu upacara adat. Dengan adanya pengangkatan itu maka orang yang bersangkutan akan mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama dengan anak kemenakan yang asli.

Pendatang yang telah diakui sebagai kemenakan tersebut hanya mendapatkan hak pakai saja atas tanah ulayat yang bersangkutan. Ketentuan yang serupa juga berlaku bagi anak kemenakan yang asli. Agar supaya hak tersebut jelas dan diakui oleh ninik mamak yang bersangkutan serta para anak nagari dari kanagarian tersebut, maka harus diadakan suatu perjamuan dengan mengundang penghulu-penghulu dalam nagari dan anak nagari. Perjamuan itu diadakan di rumah pusaka penghulu yang akan memberikan tanah itu. Adakalanya perjamuan itu juga dapat diadakan di rumah pendatang baru tersebut. Dalam perjamuan itu biasanya pendatang baru itu akan memberikan pembayaran yang berupa emas atau sejumlah uang tertentu yang nantinya akan dibagikan kepada seluruh peserta perjamuan tersebut. Dengan diadakannya perjamuan tersebut, maka berarti semua orang dalam nagari telah

mengakui haknya dan dinyatakan bahwa orang baru itu telah diberikan tanah oleh masyarakat. Selain itu ia juga diberikan pandam pakuburan serentang serta dibiarkan tinggal dalam kelompok rumah gadang yang akan ditentukan ruangnya atau tempatnya. Maksudnya tidak lain adalah sebagai pernyataan bahwa ia telah diangkat menjadi anak kemenakan dari penghulu yang mengangkatnya tadi.

Cara lain yang dapat dilakukan adalah diangkat sebagai anak kemenakan secara tidak langsung. Dalam hal ini maka kepada orang tersebut diadakan semacam pembayaran kepada kaum yang bersangkutan melalui mamak kepala warisnya. Besarnya pembayaran tersebut berbeda-beda menurut adat kebiasaan di masing-masing kanagarian, hal ini sesuai dengan pepatah adat yang berbunyi : *"karimbo babungo kayu, kasawah babungo ampiang"*, maksudnya disini adalah kepada setiap orang yang mendapatkan izin penggarapan diwajibkan untuk membayar sesuatu sebagai tanda pengakuan bahwa yang digarapnya tersebut bukan miliknya sendiri.

Oleh karena hak ulayat itu merupakan hak milik bersama dari seluruh anggota kaum, maka hampir tidak pernah terjadi hak ulayat yang diberikan dan dilepaskan sebagai hak milih mutlak kepada anak kemenakan. Seperti yang telah dikemukakan dalam penjelasan-penjelasan di muka, maka kepada anak kemenakan hanya diberikan hak pakai untuk selama-lamanya guna diambil hasilnya, dan diwarisi kepada anak keturunannya, seolah-olah tanah tersebut sudah merupakan miliknya pribadi. Tetapi satu hal yang paling penting untuk diperhatikan disini adalah bahwa tanah ulayat tersebut tidak boleh dipindah tangankan kepada pihak lain. Adapun ketentuan

mengenai pemindahan hak atas tanah ulayat ini akan dibahas lebih lanjut dalam sub bab berikutnya.

Seandainya tanah yang telah diberikan kepada anak nagari atau kepada orang luar kemudian ditelantarkan begitu saja sehingga tanah tersebut menjadi hutan rimba kembali, maka hilanglah hak dari pemakai semula atas tanah yang telah diterlantarkan itu. Hak tersebut akan hilang biasanya dalam jangka waktu dua tahun masuk tiga tahun sejak diterlantarkan. Maksudnya adalah apabila tanah tersebut telah dibiarkan begitu saja tanpa diurus dan digarap selama dua tahun berturut-turut, maka pada tahun ketiganya tanah tersebut akan kembali lagi pemiliknya kepada masyarakat hukum adat atau penghulu yang bersangkutan.

Jika ada orang lain yang berminat untuk mengolah tanah yang telah diterlantarkan itu, maka penghulunya dapat saja memberikan tanah tersebut kepada orang yang berminat setelah melalui suatu adat atau prosedur-prosedur yang telah ditentukan. Hal seperti itu biasa disebut dengan "*salang kambali*" artinya salang adalah pinjam yang akan dikembalikan lagi seandainya sudah tidak diperlukan dan dipergunakan lagi. Dalam hal salang kambali ini, penggarap yang pertama atau sebelumnya mempunyai hak terdahulu. Artinya ia mempunyai prioritas yang utama untuk tetap menggunakan tanah tersebut seandainya tanah tersebut masih diperlukannya.

Cara menggunakan tanah masyarakat oleh masyarakat hukum itu adalah untuk kehidupan anggota masyarakat, dimana tanah itu digarap sendiri oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Tanah tidak dapat dijual, digadaikan, ataupun

dihibahkan kepada orang lain, baik itu sesama anggota masyarakat hukum adat maupun kepada orang lain yang bukan merupakan anggota dari masyarakat hukum adat itu.

Tugas dari penghulu suku atau kaum sehubungan dengan penggunaan tanah adalah, bahwa setiap penghulu diwajibkan untuk menjaga keutuhan dari ulayatnya. Jangan sampai ulayat tersebut habis atau mencegah jangan sampai terjadi penyimpangan dalam penggunaan tanah ulayat tersebut dari peruntukannya yang semula. Jadi dapat kita lihat disini bahwa tugas dari seorang penghulu adalah untuk memelihara pusaka dan memelihara anak kemenakannya.

Luas dari lingkungan tanah masyarakat hukum adat adalah jika tanah tersebut adalah tanah ulayat kaum, maka luas lingkungannya adalah seluas kaum itu sendiri. Kalau adalah sesuai dengan ulayat masing-masing. Maksudnya tanah tersebut adalah tanah ulayat suku, maka luas lingkungannya adalah seluas persukuan tersebut saja. Sedangkan ulayat nagari luasnya adalah seluas kanagarian itu saja.

2.3. Perbuatan Hukum yang Dapat Dilakukan Atas Tanah Ulayat

Dari uraian-uraian pada bagian terdahulu, maka jelaslah bahwa yang berhak atas ulayat itu adalah masyarakat hukum adat yang memiliki tanah ulayat tersebut. Jika tanah tersebut merupakan hak ulayat kaum, maka yang berhak atas tanah tersebut adalah kaum itu secara keseluruhan. Begitu juga dengan tanah ulayat suku dan tanah ulayat nagari. Hanya saja pelaksanaan dari hak tersebut dilakukan oleh kepala kaum

untuk tanah ulayat kaum, penghulu suku untuk tanah ulayat suku, dan oleh kepala nagari bagi penggunaan tanah ulayat nagari.

Hal penting yang perlu kita ingat disini adalah bahwa apa yang disebut dengan ulayat kaum sekarang ini sebenarnya sudah dapat dikatakan hampir tidak ada lagi. Keadaan itu disebabkan karena penguasaannya sudah berada pada tangan anak kemenakan, sebagai ganggam bauntuak pagang bamasing, yaitu sebagai hak pakai. Dengan demikian, maka hak dan wewenang untuk memakai dan menikmati sepenuhnya berada pada tangan anak kemenakan. Sebenarnya para pemegang ganggam bauntuak pagang bamasing tadi mempunyai hak dan wewenang yang sangat luas. Tanah tersebut diperlakukan seolah-olah sudah merupakan miliknya, dan memang demikianlah halnya yang terjadi. Para anak kemenakan yang mendapatkan hak tersebut dapat menikmati dan memungut hasil dari tanah tersebut sepenuhnya serta dapat meneruskan penguasaannya dengan cara diwariskan kepada anak-anaknya. Sudah barang tentu pewarisan tersebut dilakukan menurut garis ibu. Hanya saja ada ketentuan yang harus dipatuhi yaitu mereka dilarang untuk memperjualbelikan tanah ulayat tersebut.

Terhadap tanah-tanah ulayat tersebut pada prinsipnya tidak boleh dilakukan pemindahan hak kepada pihak ketiga. Terhadap tanah tersebut hanya dapat dilakukan perbuatan hukum penggadaian saja. Tetapi penggadaian tersebut tidak boleh dilakukan dengan mudah saja, akan tetapi hanya dapat dilakukan karena adanya hal-hal yang sangat mendesak dan tidak ada alternatif penyelesaiannya yang lain selain menggadaikan tanah ulayat tersebut. Dalam perbuatan menggadaikan tanah ulayat

tersebut baru didapatkan suatu persetujuan dan kata sepakat dari seluruh ahli waris. Ketentuan lain yang harus dipenuhi adalah diperolehnya persetujuan atau disaksikan oleh kepala masyarakat hukum adat atau penghulu suku yang bersangkutan. Kesepakatan atau persetujuan bersama itu baru dapat diperoleh dari para ahli waris tanah ulayat, apabila penggadaian tanah ulayat milik mereka bersama itu disebabkan karena hal-hal berikut ini :

- a. Rumah Gadang Katirisan
- b. Gadih Gadang Indak Balaki
- c. Mayat Terbujur di Tengah Rumah
- d. Managakkan Batang Tarandam

Adapun yang dimaksud dengan alasan rumah gadang katirisan adalah, dilakukannya penggadaian tanah ulayat tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki rumah adat atau rumah bersama mereka yang telah rusak. Karena keadaannya yang sudah rusak, maka rumah kediaman bersama itu perlu disisip atau diperbaiki, sedangkan uang simpanan yang dimiliki oleh suku tidak mencukupi pada waktu itu. Karena biaya yang diperlukan untuk memperbaiki rumah gadang itu tidak sedikit, maka setelah adanya kesepakatan dari para anak kemenakan, dilakukan penggadaian sebagian dari tanah ulayat itu guna menambah dan mencukupi kekurangan biaya yang diperlukan.

Sedangkan alasan yang kedua yaitu, gadih gadang indak balaki. Maksudnya adalah jika di dalam seluruh rumah besar ada seorang anak gadis yang sudah patut untuk dinikahkan, akan tetapi keluarganya kekurangan biaya guna pengangkatan

seorang penghulu atau datuk itu dilakukan dengan mengadakan suatu pesta adat. Guna melaksanakan pesta atau upacara pengangkatan penghulu atau datuk itu, diperlukan biaya yang jumlahnya tidak sedikit. Biaya itu harus dipikul secara bersama-sama oleh seluruh anggota dari kaum yang bersangkutan. Oleh karena keperluan biaya yang tidak sedikit maka penggadaian tanah ulayat dibenarkan.

Demikian antara lain syarat-syarat yang diperlukan untuk dapat menggadaikan tanah ulayat Minangkabau. Akan tetapi dalam kenyataan yang terlihat sekarang sesuai dengan adanya kemajuan zaman serta perkembangan dari masyarakat, di Minangkabau ada kaum atau suku yang menggadaikan tanah ulayat dengan alasan-alasan lain disamping empat masalah yang telah dikemukakan di muka.

Alasan-alasan itu adalah :

1. Pengobatan untuk menutupi ketekoran dagang
2. Untuk keperluan biaya
3. Untuk biaya pendidikan
4. Karena kaumnya telah punah atau hampir punah.

Dari uraian-uraian di atas dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa pada pokoknya penggadaian tanah tersebut adalah sebagai sumber kredit. Kredit yang diperoleh dengan jalan menggadaikan tanah ulayat tersebut bukan digunakan untuk sesuatu hal yang bersifat produktif. Jadi penggadaian tersebut semata-mata dilakukan guna memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif. Dan kredit itu dikonsumsi bukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup yang bersifat primer, akan tetapi

digunakan untuk menutup apa yang dianggap memalukan, atau untuk keperluan melaksanakan upacara kematian, menegakkan penghulu dan lain sebagainya yang kesemuanya itu tujuannya tidak lain adalah untuk menjaga prestise di dalam masyarakat.

Sebenarnya cara-cara atau paham-paham yang demikian tersebut tidak sesuai dengan hukum adat Minangkabau. Walaupun ada dibukakan syarat-syarat yang memperbolehkan melakukan penggadaian tanah seperti yang telah diuraikan, tetapi perlu untuk diperhatikan disini bahwa dalam menjalankan sesuatu itu harus diutamakan pada keselamatan seluruh anggota masyarakat hukum adat. Jangan karena memelihara prestise dihadapan masyarakat, kaum kerabat menjadi miskin jadinya, karena tanah telah digadaikan, sedangkan tanah ulayat itu merupakan sumber penghidupan bagi seluruh anak kemenakan.

Memang adat Minangkabau mengutamakan perbuatan sosial, berperasaan kemasyarakatan. Akan tetapi adat juga mengatakan bahwa hal-hal yang demikian tersebut baru dapat dilaksanakan dalam keadaan ekonomi yang sudah baik. Berdasarkan contoh yang sudah terjadi, memang menggadaikan tanah itu merupakan perbuatan yang merugikan bagi kaum yang menggadaikan. Apalagi kalau perbuatan penggadaian tanah tersebut hanya dilakukan semata-mata untuk menutupi apa yang dianggap memalukan.

Jadi dari segala uraian ini dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa walaupun dalam falsafah adat Minangkabau tanah ulayat itu dapat digadaikan, akan tetapi dalam pelaksanaannya penggadaian tersebut tidak dapat dilakukan dengan mudah.

Mungkin saja terjadi tanah ulayat itu tidak bisa digadaikan sebagai suatu larangan yang tidak nyata.

Sebelum melakukan perbuatan penggadaian atas tanah ulayat maka terlebih dahulu dipenuhi berbagai ketentuan berikut ini :

1. Mula-mula dicarikan terlebih dahulu orang-orang diantara kaum itu sendiri yang nantinya akan bertindak sebagai pemegang gadai. Artinya disini adalah, dicarikan kaum keluarga yang terdekat. Apabila orang satu kaum tidak ada, baru dicarikan orang yang sesuku dengan pemilik ulayat, dan apabila orang yang sesuku juga tidak ada maka dicarilah orang-orang yang ada dalam suatu nagari.
2. Setelah ada persesuaian antar pemegang gadai dan pemberi gadai, terlebih dahulu harus dimintakan persetujuan dari seluruh anggota susukan atau kaum pemilik ulayat. Biasanya untuk melakukan perbuatan gadai ulayat ini kaum atau suku diwakili oleh penghulunya. Selain dari anggota masyarakat, persetujuan juga harus didapatkan dari mamak kepala waris yang bersangkutan. Jika persetujuan tidak didapatkan maka gadai tidak dapat dilaksanakan.
3. Apabila izin sudah diperoleh dari seluruh anggota kaum atau suku dan dari mamak kepala warisnya, maka barulah gadai dapat dilakukan menurut harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
4. Adapun pelaksanaan gadai itu harus dilakukan dihadapan Kepala Nagari dan dibuatkan surat gadainya.
5. Surat gadai tersebut selain ditandatangani oleh kedua boleh pihak yang bersangkutan, juga harus menyertakan tanda tangan dari mamak kepala waris

yang berasal dari pihak pemberi gadai dan pihak pemegang gadai dan juga disertai dengan saksi-saksi, yang terdiri dari anggota-anggota kaum yang diketahui oleh Kepala Nagari dari kedua belah pihak yang melakukan perbuatan gadai tanah ulayat.

Dengan dilaksanakannya segala proses tersebut, maka selesailah proses gadai antara kedua belah pihak, dan tanah yang telah digadaikan tersebut akan digunakan oleh orang yang memegang gadai.

Mengenai perselisihan-perselisihan atau sengketa-sengketa mengenai tanah ulayat, walaupun tidak sering terjadi akan tetapi kadang-kadang ada juga terjadi di beberapa kanagarian. Sengketa-sengketa tersebut biasanya terjadi antara sesama anggota kaum, antara kaum atau suku yang satu dengan anggota kaum atau suku yang lain ataupun antara suatu nagari dengan nagari yang lain. Adapun yang menjadi sebab utama dari persengketaan itu antara lain adalah :

- a. Persengketaan karena persoalan waris
- b. Persengketaan karena persoalan batas
- c. Persengketaan karena soal tidak adilnya pembagian tanah garapan.

Cara penyelesaian apabila ada perselisihan mengenai hal-hal tersebut di atas, diselenggarakan menurut adat melalui Kerapatan Adat Nagari beserta penghulu-penghulu adat yang bersangkutan. Dalam masyarakat Minangkabau, sengketa disebut dengan kusuik, dimana kusuik tersebut dapat dibedakan ke dalam empat golongan yaitu :

- a. Kusuik bulu ayam, paruah nan manyalasaikan

- b. Kusuik banang, dicari ujung jo pangka
- c. Kusuik rambuik, dengan sisir dan diberi minyak
- d. Kusuik sarang tampuo, api nan menyudahi.

Keterangan :

Yang dimaksud dengan kusuik bulu ayam adalah sengketa-sengketa yang terjadi diantara anggota suatu kaum. Adapun menutup cara penyelesaiannya adalah dilakukan melalui mamaknya atau pimpinannya, yaitu orang yang dituakan atau ditinggikan seranting.

Kusuik banang maksudnya adalah sengketa-sengketa yang terjadi antara satu kaum dengan kaum yang lainnya. Biasanya disini dicari ujung dan pangkal dari sengketa-sengketa yang timbul tersebut, dalam arti diselenggarakan oleh ninik mamak yang berkepentingan. Dalam kusuik rambuik, sengketa yang terjadi adalah antara suku atau antar suku atau antar kaum. Biasanya cara penyelesaian yang dilakukan adalah dicari mana yang benar dan diluruskan mana yang salah oleh para ninik mamaknya.

Sedangkan yang dimaksud dengan kusuik sarang tampuo adalah sengketa yang sudah demikian beratnya sehingga penyelesaiannya diserahkan kepada badan peradilan. Disini berlaku ketentuan adat “menang jadi arang, kalah jadi abu”. Hal ini tidak dikehendaki oleh adat, dan tiap sengketa mengenai tanah ulayat di Minangkabau diharapkan hendaknya tidak berakhir dengan penyelesaian melalui pengadilan. Penyelesaian tersebut oleh orang Minang disebut sebagai penyelesaian dengan api akan menimbulkan permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal

tersebut disebabkan karena apabila persengketaan mengenai tanah ulayat itu sudah sampai ke pengadilan maka hal tersebut berarti bahwa perselisihan antara kedua belah pihak sudah sedemikian gawatnya, sehingga akan sulit untuk merujuk kembali kedua belah pihak yang bersengketa tersebut.

Jika ternyata terjadi sengketa antara kaum di Minangkabau, biasanya masalah tersebut dibawa bermusyawarah. Dalam pepatah adat disebut "*bajanjang naik batanggo turun*", yang artinya bahwa untuk menyelesaikan persengketaan tersebut dilakukan melalui suatu proses yang bertingkat-tingkat. Pertama-tama penyelesaiannya dilakukan melalui ninik mamak yang bersangkutan. Apabila permusyawaratan yang dilakukan oleh ninik mamak tersebut tidak memperoleh kata sepakat, maka masalah itu akan dibawa kepada ninik mamak suku untuk diselesaikan. Dan kalau masih juga tidak diperoleh kesepakatan juga, maka persengketaan tersebut dibawa ke ninik mamak tingkat nagari yang ada di kanagarian, dan dimusyawarahkan dalam suatu musyawarah adat nagari. Setiap ninik mamak yang terdapat dalam kanagarian tersebut terlibat secara langsung dalam penyelesaian bukan merupakan anak kemenakannya. Penyelesaian persengketaan melalui musyawarah adat nagari ini merupakan upaya terakhir dalam rangka penyelesaian persengketaan mengenai tanah ulayat menurut ketentuan adat Minangkabau.

Apabila penyelesaian secara adat ini tidak mungkin untuk dilaksanakan atau tidak dapat mengambil suatu keputusan, maka barulah penyelesaiannya dilangsungkan kepada Pengadilan Negeri. Akan tetapi kadang-kadang ada pula terjadi bahwa suatu perkara tanah adat langsung diteruskan atau diajukan kepada

Pengadilan Negeri untuk menetapkan penyelesaiannya. Apabila terjadi hal yang demikian ini maka Pengadilan Negeri akan menyarankan agar supaya persengketaan ini diupayakan penyelesaiannya melalui ketentuan adat terlebih dahulu.

2.4. Struktur dan Sistim Kekerabatan Masyarakat Adat Minangkabau

Masyarakat Indonesia terdiri dari beraneka ragam suku bangsa yang hidup berdampingan. Menurut Koentjaraningrat dalam bukunya *Pengantar Ilmu Antropologi* : “Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontiniu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama”.⁷

Sudah menjadi hukum alam bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa ada manusia lain disekitarnya. Manusia pasti memerlukan manusia lain guna melakukan interaksi dan bekerjasama. Sejak seseorang dilahirkan dia telah hidup dalam keluarga dan dalam perkembangannya dikemudian hari ia akan mengenal anggota keluarganya yang lain serta para tetangga yang hidup disekitarnya. Keluarga merupakan suatu kesatuan hidup yang terdiri dari ayah dan ibu serta anak-anak yang dipimpin oleh orang tua dan memiliki harta kekayaan. Para anggota keluarga tidak hanya bergaul dalam keluarga, akan tetapi juga bergaul dan berhubungan dengan kakek, nenek, anak, kemenakan, paman, bibi, ipar, besan. Hubungan persaudaraan tersebut merupakan hubungan kekerabatan yang tata tertib hubungannya dipengaruhi oleh hukum adat kekerabatan menurut struktur masyarakatnya di masing-masing

⁷ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropology*, Jakarta, 1980, hal. 160.

tempat. Hubungan kekeluargaan dan kekerabatan selain ditentukan dengan adanya hubungan darah dan perkawinan, dapat juga terjadi karena adanya hubungan baik yang merupakan hubungan adat, dalam bentuk pengangkatan anak atau saudara, ataupun hanya dalam bentuk pengakuan saja. Hukum kekerabatan adat merupakan aturan-aturan adat yang mengatur bagaimana hubungan antara warga adat yang satu dengan warga adat yang lain dalam ikatan kekerabatan. Pada masyarakat adat Indonesia terdapat beberapa macam sistem kekerabatan yang mempengaruhi dalam cara menarik garis keturunan. Sistem kekerabatan tersebut terdiri dari :

1. Sistem Kekerabatan Bilateral atau Parental
2. Sistem Kekerabatan Patrilineal
3. Sistem Kekerabatan Matrilinea

Sistem kekerabatan bilateral atau parental ini adalah suatu sistem kekerabatan yang menghubungkan garis keturunannya secara serentak melalui pihak ayah dan ibunya, sistem kekerabatan patrilineal adalah suatu sistem kekerabatan yang menghubungkan garis keturunan melalui pihak laki-laki saja.

Sementara sistim kekerabatan yang dianut oleh masyaraakat adat di Minangkabau adalah sistem kekerabatan matrilineal yaitu suatu sistem kekerabatan yang menghubungkan garis keturunan melalui pihak perempuan. Sistem ini dikenal dengan sebutan sistem keibuan. Menurut Koentjaraningrat, prinsip matrilineal adalah :

...yang menghidupkan hubungan kekerabatan melalui orang wanita saja dan karena itu mengakibatkan bagi tiap-tiap individu dalam masyarakat semua kerabat ibunya masuk dalam batas hubungan kekerabatannya sedangkan semua kaum kerabat ayahnya jatuh di luar batas itu ...⁸

Sedangkan Hazairin menjelaskan prinsip garis keturunan matrilineal sebagai berikut :

Orang Minang lain pula caranya dalam menarik garis keturunan yang menentukan bagi keluarga mereka, yaitu setiap orang laki-laki dan perempuan menarik garis keturunan ke atas hanya melalui penghubung perempuan saja sebagai saluran darah yaitu setiap orang itu menarik garis keturunan kepada ibunya dan dari ibunya kepada ibu dari ibunya itu dan begitulah seterusnya.⁹

Sistem kekerabatan ini terdapat pada masyarakat Minangkabau.

Di Minangkabau unsur genealogis atau pertalian darah kita dapati sebagai unsur pemersatu atau pengikat masyarakat hukum adat. Faktor genealogis yang dipakai sebagai dasar daripada organisasi masyarakat Minangkabau yaitu faktor genealogis yang dilihat dari keturunan ibu yang disebut sebagai sistem matrilineal. Dengan demikian maka jelaslah bahwa orang Minangkabau mempunyai tata susunan masyarakat menurut hukum ibu, dan unsur inilah yang memegang peranan penting dalam masyarakat Minangkabau.

Sebagaimana yang telah dikemukakan dalam penjelasan-penjelasan di muka bahwa dalam masyarakat Minangkabau tata susunan masyarakatnya disusun menurut hukum ibu. Unsur matrilineal inilah yang memegang peranan di dalam organisasi masyarakat Minangkabau. Sebelum membicarakan sistem kekerabatan

⁸ Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Jakarta, 1967, 125.

⁹ Hazairin, *Op. cit.*, hal. 7.

yang terdapat di masyarakat Minangkabau, ada baiknya jika terlebih dahulu diketahui struktur organisasi dari masyarakat yang bersangkutan.

Sebagai suatu kesatuan yang merupakan dasar daripada organisasi masyarakat Minang, kita jumpai suatu persekutuan hidup yang bernama paruik. Menurut Chairul Anwar :

Paruik adalah suatu masyarakat hukum yang dalam bahasa Indonesia dapat kita samakan dengan keluarga, akan tetapi perlu kita perhatikan bahwa pengertian keluarga disini harus diartikan sebagai keluarga besar yang dihitung dari garis ibu, sedangkan suami-suami dari para anggota paruik tidak termasuk didalamnya.¹⁰

Dalam perkembangan masa maka paruik-paruik akan bertambah besar dan dengan bertambahnya anggota-anggota sebuah paruik maka paruik tadi akan membelah diri di dalam kesatuan-kesatuan baru yang lebih kecil yang dikenal dengan nama jurai. Mengenai masalah jurai ini Chairul Anwar berpendapat :

Yang dimaksud dengan jurai adalah keluarga yang sedapur karena tiap-tiap wanita yang telah menikah akan mendirikan tngku-tungku baru untuk memberi makan anak-anaknya. Gabungan dari jurai inilah yang kemudian bergabung membentuk sebuah paruik.¹¹

Jurai dapat dibagi lagi kedalam kesatuan yang lebih kecil lagi yang dinamakan samande, yaitu orang-orang yang berasal dari satu ibu.

Di dalam perkembangan selanjutnya berkembanglah kesatuan-kesatuan matrilineal baru di samping paruik asalnya yang merupakan lingkungan pertalian

¹⁰ Chairul Anwar, *Meninjau Alam Minangkabau*, Jakarta, 1967, hal 12.

¹¹ *Ibid*, hal. 13

darah yang dilihat dari garis ibu, kesatuan tersebut dikenal dengan nama suku. Anggota-anggota suku hanya diikat oleh pertalian darah menurut garis ibu saja. Suku tidak terikat pada suatu daerah tertentu yang didiami bersama oleh para anggota suku tersebut.

Perkembangan lebih lanjut beberapa suku yang bersama-sama menempati suatu wilayah akan bergabung membentuk suatu nagari. Biasanya suatu nagari merupakan gabungan dari empat buah suku. Nagari merupakan suatu masyarakat hukum adat yang berdasarkan pada faktor genealogis dan teritorial dalam mempersatukan anggota-anggotanya.

Pada masyarakat Minangkabau, sistem kekerabatan yang berdasarkan sistem keibuan atau matrilineal, dipakai sebagai dasar dimana orang yang seasal dan seketurunan berkumpul dalam suatu tempat tinggal bersama. Tempat tinggal tersebut berupa sebuah rumah adat yang besar dan biasanya disebut dengan rumah gadang. Di dalam rumah gadang tersebut yang memegang peranan penting serta bertanggung jawab atas seluruh penghuninya adalah saudara laki-laki ibu yang disebut dengan mamak. Jadi dapat dilihat disini, walaupun organisasi masyarakat Minangkabau berdasarkan atas garis keturunan ibu, namun yang memegang peranan penting di dalam kesatuan-kesatuan tersebut selalu orang laki-laki dari garis ibu yang biasanya merupakan saudara laki-laki ibu yang paling tua.

Di dalam sebuah paruk yang memegang peranan juga seorang laki-laki dari garis ibu yang dinamakan kapalo paruk atau bisa juga dikenal dengan sebutan penghulu andiko. Kapalo paruk melindungi dan mengurus segala kepentingan

paruiknya yang dikuasakan kepadanya. Biasanya kapalo dipilih dari jurai tertua dari paruik tersebut. Kapalo paruik atau penghulu andiko tersebut terhadap jurainya sendiri merupakan seorang mamak bagi para kemenakannya, disamping kedudukannya sebagai kepala dari gabungan jurai-jurai yang separuik. Jadi fungsinya adalah dua, di satu pihak sebagai mamak dari jurainya dan di lain pihak ia juga sekaligus merupakan penghulu dari sebuah paruik. Biasanya kapalo paruik diambil dari jurai yang tertua.

Alam Minangkabau terbagi kedalam dua kelarasan, yaitu terdiri dari :

1. Laras Koto Piliang
2. Laras Bodi Chaniago

Laras Koto Piliang dipimpin oleh Datuk Ketumanggungan, dimana laras ini mewakili adat dan lembaga tua yang konservatif. Sedangkan Laras Bodi Chaniago yang dipimpin oleh Datuk Perpatih Nan Sebatang menggunakan sistem musyawarah di dalam pemerintahannya. Sebenarnya kalau kita hubungkan laras dengan pemerintahan, maka laras ini mempunyai arti sebagai suatu sistem pemerintahannya, yaitu sistem pemerintahan menurut adat Ketumanggungan serta sistem pemerintahan menurut adat Perpatih Nan Sebatang. Daerah Minangkabau sendiri terbagi ke dalam tiga buah luhak. Pengertian luhak disini dihubungkan dengan daerah atau territorial tertentu, yaitu :

- a. Luhak Tanah Datar
- b. Luhak Agam
- c. Luhak Lima Puluh Koto

Pembagian ketiga luhak ini juga ada hubungannya dengan sistem pemerintahan. Nagari-nagari di luhak Agam umumnya sistem pemerintahannya secara adat Bodi Chaniago. Nagari-nagari di luhak Lima Puluh Koto sistem pemerintahannya secara adat Koto Piliang. Sedangkan nagari-nagari di luhak Tanah Datar sistem pemerintahannya merupakan gabungan dari sistem Bodi Chaniago dan Koto Piliang.

Untuk mempertahankan garis keturunannya yang matrilineal, maka masyarakat Minangkabau melakukan perkawinan dengan orang-orang yang berasal dari luar klennya (eksogami). Adapun bentuk perkawinan eksogami tersebut adalah perkawinan semendo, dimana dalam perkawinan ini suami dan istri tetap tinggal dalam ikatan kekerabatannya masing-masing. Dengan lain perkataan, istri tidak masuk menjadi anggota keluarga suami dan suami juga tidak menjadi anggota keluarga istrinya. Perkawinan semendo merupakan perkawinan yang matrilokal, jadi istri tidak wajib mengikuti tempat tinggal suami, maupun tempat tinggal keluarga suami.

Jika seorang laki-laki dan perempuan menikah, maka perempuan itu tidak bisa meninggalkan klennya. Perkawinan pada sistem kekeluargaan matrilineal tidak merubah status hukum para pihak. Pihak perempuan tidak bisa meninggalkan klennya karena ia merupakan penghubung keturunan. Sedangkan laki-laki adalah pihak yang harus bertanggung jawab terhadap klennya, jadi iapun tidak bisa meninggalkan klennya. Jadi pada masyarakat Minangkabau pihak laki-laki yang datang sebagai urang sumando, dimana fungsinya adalah sebagai pendatang atau tamu di rumah

istrinya. Dalam perkembangannya kemudian, perkawinan semendo bentuknya berkembang menjadi perkawinan semendo menetap. Kebiasaan merantau merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap kehidupan perkawinan. Hazairin membedakan perkawinan semendo yang terdapat pada masyarakat Minangkabau menjadi sebagai berikut :

- a. Perkawinan Bertandang
- b. Perkawinan Semendo Menetap di Kampung
- c. Perkawinan Menetap di Kota
- d. Perkawinan Semendo Bebas

Perkawinan bertandang adalah bentuk perkawinan semendo dimana suami hanya datang ke rumah istrinya pada waktu tertentu saja. Diantara suami istri tidak dijumpai suatu kehidupan keluarga secara bersama-sama dan para pihak tetap pada keluarganya masing-masing. Dalam bentuk perkawinan ini hubungan antara ayah dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak erat, karena mereka jarang bertemu.

Perkawinan semendo menetap di kampung mempunyai beberapa perbedaan, karena suami sudah tinggal dan menetap di kampung istrinya. Suami yang tinggal di kampung istrinya tersebut sudah turut membantu. Perkawinan ini sudah mulai ada suatu bentuk kehidupan bersama sehingga hubungan antara ayah dan anak-anaknya sudah mulai erat karena mereka tinggal bersama di dalam sebuah rumah gadang, atau mendiami sendiri di kampung istri.

Pada perkawinan semendo menetap di kota, istri mengikuti suaminya yang mempunyai mata pencaharian di kota. Keluarga baru yang dibentuk di rantau masih belum bebas dari pengaruh keluarga istri dalam hal mengenai harta, meskipun suami istri itu telah mempunyai penghasilan sendiri. Persamaan derajat ada pada semua bentuk perkawinan matrilineal. Dalam perkawinan ini sudah ada kehidupan bersama sebagai suami istri menurut hukum.

Dalam perkawinan semendo bebas, keluarga baru yang dibentuk sudah bebas dari harta keluarga istri. Keluarga ini semata-mata menggantungkan hidupnya dari mata pencaharian mereka, guna memenuhi kebutuhan sehari-hari serta biaya bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dalam keluarga baru yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak tersebut, ayah mempunyai kedudukan penting sebagai seorang pemimpin keluarga yang didampingi oleh istrinya. Dalam masyarakat Minangkabau zaman dahulu ayah hanya sebagai orang datang sehingga yang bertindak sebagai pemimpin keluarga dalam sebuah rumah gadang adalah seorang mamak. Karena anak-anak yang lahir langsung menggabungkan diri dengan jurai ibunya yang dikepalai oleh mamak, maka dengan demikian seorang mamak dianggap sebagai bapak bagi keluarga Minangkabau.

Tetapi kita tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa ayah melepaskan diri dari tanggung jawab terhadap anak-anaknya karena sudah ada mamak. Ayah tetap wajib memberikan nafkah dan pakaian anak-anaknya, sedangkan mamak wajib memberikan pendidikan bagi para kemenakannya. Jadi sebenarnya bagi anak-anak Minang ada dua tempat bersandar, pertama ayah, kedua mamak. Hal tersebut dapat dilihat pada

pepatah adat yang berbunyi “*mamak karano adat, bapak karano darah*”. Selain itu ada juga pepatah adat lain yang menggambarkan eratnya hubungan seorang anak dengan ayah dan mamaknya yang berbunyi : “*Anak dipangku, kemenakan dibimbiang*”, artinya adalah seorang laki-laki Minangkabau selain harus memelihara anak-anaknya juga harus memperhatikan kemenakannya. Selain mengurus kemenakan, seorang mamak juga bertanggung jawab dalam pengurusan harta peninggalan dari orang tuanya bagi kehidupan anak kemenakannya di kemudian hari.

Dewasa ini di Minangkabau dapat dilihat bahwa seorang ayah telah memberikan tanggung jawab yang besar terhadap isteri dan anak-anaknya baik secara moriil maupun materiil. Susunan baru ini antara lain merupakan pengaruh dari ajaran hukum Islam yang dianut oleh hampir seluruh orang Minangkabau. Islam memperkenalkan ayah sebagai kepala keluarga yang harus memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya, sehingga ajaran agama Islam mempelopori susunan keluarga baru di Minangkabau. Selain itu masuknya pengaruh dari kebudayaan bangsa Barat yang juga membawa susunan keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anaknya menyebabkan semakin nyatalah perkembangan susunan kekerabatan Minangkabau ke arah susunan baru. Dengan adanya perkembangan baru itu maka dapat dilihat hubungan antara mamak dan kemenakan yang tadinya erat semakin lama semakin renggang. Mamak yang tadinya dianggap sebagai tempat bertanya jika hendak pergi dan sebagai tempat memberikan kabar berita jika telah pulang kembali sebagaimana yang dikatakan pepatah adat : “*Pai tempek batanyo, pulang tampek babarito*”, dewasa ini sudah tidak seperti itu lagi. Hubungan antara mamak dan kemenakan pada

umumnya sudah mengarah kepada formalitas belaka. Kemenakan-kemenakannya sekarang sudah lebih dekat kepada ayah mereka.

Didesak oleh kebutuhan-kebutuhan hidup yang semakin maju serta perkembangan zaman dan masyarakat ke arah kehidupan yang modern maka dapat dilihat bahwa orang Minangkabau telah bergerak kearah susunan keluarga yang baru, dimana ayah menjadi pimpinan keluarga. Suami isteri sudah tidak begitu terikat lagi pada paruik mereka. Suami isteri tersebut bersama-sama mencari nafkah dan membesarkan anak-anak mereka. Pada keluarga baru yang telah pergi merantau dapat dikatakan bahwa mereka sudah tidak tergantung lagi pada lingkungan keluarga mereka yang ada di kampung. Kehidupan mereka semata-mata telah tergantung kepada hasil pencaharian di rantau. Dengan demikian maka anak-anak yang dilahirkan, dibesarkan dengan nafkah pencaharian dari orang tuanya. Anak-anak tersebut yang ada di kampung. Di samping itu dewasa ini dapat dilihat kenyataan yang ada pada anak-anak Minang yang ada di rantau, bahwa banyak diantara mereka yang tidak memahami seluk beluk adat istiadat Minangkabau. Tampaknya banyak diantara mereka yang enggan untuk mempelajarinya disamping kurangnya pengetahuan yang mereka dapatkan dari orang tua mereka tentang adat istiadat Minangkabau. Tentu saja hal ini menimbulkan keprihatinan, karena sekarang ini banyak sekali orang Minang yang pergi merantau meninggalkan kampung halaman dengan tujuan untuk menuntut ilmu yang lebih tinggi, sehingga dikhawatirkan lambat laun orang yang memahami adat akan semakin berkurang. Bukan tidak mungkin

apabila tidak dilestarikan, suatu saat nanti adat istiadat Minangkabau yang asli itu akan punah karena tidak ada generasi penerus yang memelihara kelangsungannya.

Menurut adat, perkawinan diatur oleh mamak beserta ibu dan saudara-saudara yang sejurai. Sekarang hal demikian itu sudah mulai jarang dilakukan. Dengan adanya pembaharuan tadi, anak telah memiliki kebebasan untuk menentukan sendiri siapa yang akan menjadi jodohnya yang kemudian nanti akan menjadi teman hidupnya dalam mendirikan rumah tangga. Orang tua Minangkabau dewasa ini sudah banyak yang memberikan kelonggaran terhadap perkawinan anak-anaknya. Mereka memperhatikan kebahagiaan diberitahukan kepada seluruh anggota jurai dan biasanya anggota-anggota jurai yang lainnya tinggal memberikan persetujuan saja.

Diantara perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam bidang kekerabatan pada masyarakat Minangkabau itu dapat dilihat bahwa dalam hal-hal yang berhubungan dengan harta pusaka, penyelesaiannya masih dilakukan menurut ketentuan adat oleh para anggota yang seibu atau yang biasa mereka sebut sainduak, sajurai dan apabila dianggap perlu dengan orang-orang yang saparuik. Jadi disini dapat dilihat bahwa susunan yang lama yang terdapat dalam masyarakat Minangkabau masih belum habis, belum hilang. Hanya perkembangan baru yang terjadi tersebut memberikan unsur-unsur baru terhadap pelaksanaan dari ketentuan adat Minangkabau.

Dengan memperhatikan uraian-uraian di atas, maka harus disadari bahwa proses perkembangan tersebut terjadi secara berangsur-angsur dan dalam jangka waktu yang lama. Bisa terjadi bertahun-tahun, bahkan mungkin juga dalam waktu

puluhan tahun. Perubahan-perubahan itu tidak terjadi dalam jangka waktu yang relatif singkat. Perlu diingat bahwa perubahan dan perkembangan tersebut tentu masih akan mengalami proses lebih lanjut yang senantiasa menyesuaikan diri dengan kebutuhan-kebutuhan serta perkembangan zaman.

2.5. Sistem Kewarisan Pada Masyarakat Minangkabau

Meninggalnya seseorang akan menimbulkan masalah kewarisan karena orang yang meninggal tersebut mempunyai harta kekayaan yang dapat berupa aktiva maupun passiva. Masalah yang timbul adalah, kepada siapa hak dan kewajibannya akan dipindahkan atau dialihkan. Bagi orang yang meninggal dunia maka ia disebut sebagai pewaris, sedangkan harta yang ditinggalkannya disebut sebagai harta peninggalan atau harta warisan. Dalam masyarakat hukum adat Indonesia sistem kewarisan yang dikenal ada beberapa macam yaitu :

1. Sistem Kewarisan Individual
2. Sistem Kewarisan Kolektif
3. Sistem Kewarisan Mayorat

Pada sistem kewarisan individual, harta peninggalan dapat dibagikan secara perseorangan pemilikannya kepada masing-masing ahli waris. Yang dibagikan adalah hak milik, sehingga ahli waris memperoleh hak milik atas bagiannya terhadap harta peninggalan dari pewaris. Didalam hukum adat, meskipun sistem kewarisannya individual, tidaklah berarti kewajiban untuk membagi harta peninggalan. Jika harta tersebut masih dibutuhkan untuk kehidupan janda dan anak-anaknya yang belum

dewasa, maka harta peninggalan itu umumnya belum dapat dibagikan. Di samping itu mungkin pewaris selama hidupnya mempunyai hutang, maka hutang-hutang tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum harta peninggalan dibagikan. Sistem kewarisan individual ini antara lain terdapat pada masyarakat Tapanuli, Jawa, dan Sunda.

Pada sistem kewarisan kolektif, harta peninggalan tersebut tidak bisa dibagikan pemilikannya secara individual kepada ahli warisnya. Dalam sistem ini harta peninggalan diwariskan secara bersama-sama oleh para ahli waris. Ahli waris dapat memakainya secara individual, akan tetapi penggunaan secara perorangan tersebut terbatas hanya sebagai hak pakai saja karena pemilikannya tetap secara kolektif pada semua ahli warisnya. Sistem kewarisan kolektif ini antara lain terdapat pada masyarakat Minangkabau.

Dalam masyarakat Minangkabau, sesuai dengan sistem kekerabatannya yang berdasarkan garis ibu, maka ahli warisnyapun ditentukan menurut garis ibu juga. Pada masyarakat Minangkabau harta peninggalan yang akan diwariskan tersebut dapat berupa :

- a. Harta Pustaka
- b. Harta Pencaharian

Harta pustaka dapat dibedakan lagi menjadi harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi terdiri dari Sako dan Pusako. Sako biasanya berbentuk gelar, sedangkan pusako berbentuk tanah atau hak ulayat. Sako diturunkan dari seorang mamak kepada kemenakannya, begitu juga pusako yang diturunkan

kepada kemenakannya. Hal yang sering terjadi adalah seorang mamak yang membawa harta pusaka tinggi keluarganya ke rumah istri dan mewariskannya kepada anak-anaknya, padahal mamak tersebut seharusnya mewariskan harta pusaka tinggi keluarganya kepada para kemenakannya. Hal seperti ini tentunya akan menimbulkan sengketa, karena para kemenakan akan menuntut sang mamak atas harta pusaka yang memang merupakan hak mereka. Secara yuridis, harta pusaka tinggi adalah harta atau tanah yang telah diwarisi lebih dari tiga generasi secara turun temurun, dan yang berhak untuk mewarisinya adalah para kemenakan menurut garis ibu. Pewarisan atas harta pusaka tinggi tersebut dilakukan secara kolektif dan hak yang diperoleh para ahli waris secara individual hanya sebatas pada hak pakai.

Dalam wawancara yang kami lakukan dengan Bapak Sjahmunir. A.M., SH., dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, mengatakan : “Secara teori, harta pusaka rendah adalah tanah yang masih jelas siapa pemiliknya. Jadi, harta pusaka rendah adalah harta turun kepada anak dan menjadi harta pencaharian ayahnya bagi anak tersebut. Bisa juga seorang suami yang mendapatkan tanah dari orang tuanya dan dibawanya ke dalam perkawinannya, kemudian hasil dari tanah tersebut dimasukkan ke dalam bagian harta suarang dan dinikmati oleh anak-anaknya, dan nanti kalau ia meninggal dunia, maka tanah tersebut akan dikembalikan kepada kaumnya lagi”.

Apabila kita menghadapi harta pusaka rendah, maka yang merupakan ahli warisnya adalah anggota-anggota keluarga menurut garis ibu. Ahli waris di Minangkabau dibedakan menjadi :

1. Ahli Waris Bertali Darah (Warih nan Dakek)

2. Ahli Waris Bertali Adat (Warih nan Jauah)

Ahli waris bertali darah adalah ahli waris kandung. Jika seorang ibu meninggal dunia maka ahli warisnya yang pertama-tama adalah anak-anaknya, kemudian cucu-cucunya serta akhirnya keturunan selanjutnya dari mereka ini. Para ahli waris tersebut sering diisitilahkan dengan ahli waris satampok, ahli waris sajangka, ahli waris saheto. Selama ahli waris yang satampok masih ada, maka ahli waris yang sajangka belum berhak untuk mewaris. Apabila ahli waris satampok tidak ada lagi barulah ahli waris sajangka maju sebagai ahli waris sedangkan ahli waris saheto baru berhak mewaris apabila ahli waris yang satampok dan sajangka tidak ada lagi. Apabila ketiga ahli waris ini sudah tidak ada lagi maka barulah ahli waris yang bertali adat berhak untuk mewarisi harta peninggalan pewaris. Ahli waris yang bertali adat adalah segala anggota keluarga yang sedarah dilihat garis ibu, akan tetapi tidak merupakan keturunan langsung dari pewaris.

Apabila seorang laki-laki yang belum menikah meninggal dunia, maka ahli waris bertali darahnya adalah orang tua dan saudara-saudara baik yang laki-laki maupun yang perempuan yang sekandung. Dalam hal ini anak-anak dari saudara kandungnya bukan merupakan ahli waris. Demikian pula halnya jika yang meninggal dunia adalah seorang perempuan yang tidak atau belum menikah ataupun pernah menikah akan tetapi tidak dikaruniai anak, maka ahli warisnya yang pertama-tama adalah orang tua dan saudara kandungnya.

Dalam bentuk perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau dewasa ini sudah terjadi harta pencaharian. Hal ini kemudian akan menimbulkan masalah kalau suami meninggal dunia. Anak-anak akan mengatakan bahwa harta yang ada adalah harta orang tuanya yang merupakan hasil pencaharian, sedangkan kemenakan-kemenakannya akan menuntut dengan mengatakan bahwa harta tersebut adalah harta mamaknya dan mereka menuntut agar harta tersebut diserahkan kepada mereka, sehingga terjadi sengketa.

Sebetulnya dalam seminar-seminar yang diadakan di Sumatera Barat, telah ada kesepakatan untuk menghindarkan terjadinya sengketa maka harta pusaka tinggi diwariskan kepada kemenakan, sedangkan harta pencaharian diwariskan kepada anak. Walaupun seorang namak akan memberikan sebagian dari hartanya untuk kemenakan maka hal tersebut diperbolehkan, asalkan hanya sebagian kecil saja dengan perhatian bahwa pemberian tersebut tidak berakibat terlantarnya anak-anaknya dan isteri pewaris. Seorang ayah bisa menghibahkan harta pusaka kaumnya kepada anak apabila kaum tersebut telah punah, dan bagi si anak, harta pusaka tersebut merupakan pencaharian ayahnya.

Di samping kedua bentuk harta yang telah diterangkan di muka tadi, masih terdapat satu jenis harta lagi yaitu yang bisa disebut sebagai harta suarang. Harta suarang itu tidak sama dengan harta pencaharian, sebab harta suarang adalah segala harta yang diperoleh secara bersama-sama selama berlangsungnya perkawinan mereka. Ukuran dari besarnya kerjasama yang dilakukan tergantung pada keadaan. Perkembangan yang terjadi sekarang, suami berusaha untuk kepentingan isteri dan

anak-anaknya sehingga keluarga akan mengumpulkan harta sendiri yang dinamakan harta suarang yang merupakan harta keluarga. Sebagai akibat keluarga yang berdiri sendiri itu timbul pembagian kerja diantara anggota keluarga. Dengan demikian unsur kerjasama yang dimaksud bukan berarti dalam rangka memperoleh harta suarang ini isteri harus pula melakukan pekerjaan yang serupa dengan suaminya, akan tetapi cukup suami yang berusaha di luar. Sedangkan isteri sebagai ibu rumah tangga membina keluarga harmonis dan mendorong suami untuk meningkatkan prestasi kerjanya, untuk mengumpulkan harta suarang yang sebanyak-banyaknya.

Harta suarang baru dapat dibagi kalau suatu perkawinan bubar, setelah terlebih dahulu dilunasi hutang-hutang bersama kedua suami isteri. Adapun cara pembagiannya adalah sebagai berikut :

- Bila suami isteri bercerai hidup dan tidak mempunyai anak, maka harta suarang dibagi dua.
- Bila suami isteri bercerai hidup ada anaknya maka harta dibagi dua antara suami isteri tersebut, sedangkan anak menikmati bagian dari ibunya.
- Sedangkan apabila suami atau isteri meninggal dunia dengan meninggalkan anak, maka dewasa ini dapat dilihat bahwa harta suarang tersebut diwarisi oleh janda atau duda beserta anak-anaknya yang ditinggalkan.

Sebagaimana diuraikan diatas maka, maka peranan dan **fungsi perempuan terhadap harta pusaka di Minangkabau** tetap seperti yang digambarkan oleh pepatah-petitih selama ini “Bundo kanduang limpapeh Rumah Gadang”, hanya

bersifat simbolis, memang harta pusaka yang telah terbagi (teruntuk) “ganggam bauntuak pagang bamasiang” jatuhnya ketangan anak perempuan dan anak laki-laki harus hidup dari pencahariannya sendiri, tetapi, keputusan strategis tentang harta pusaka dalam kehidupan sehari-hari tetap berada ditangan Mamak Kepala Waris, Penghulu yang kesemuanya laki-laki. Tidak ada satu keputusan pun yang bersumber dari perempuan Minangkabau, termasuk dalam pengelolaan harta pusaka, satu-satunya warisan budaya yang menjadi kebanggaan perempuan Minangkabau mungkin hanyalah bahwa anak yang mereka lahirkan mengikuti garis keturunan sisilsilah ibunya. Dalam struktur masyarakat pun perempuan yang dikelompokkan sebagai Bundo Kanduang itu nyaris hanya pelengkap belaka, sehingga terpenuhi komponen lapisan masyarakat. Masalah uang jempukan dalam perkawinan bajapuik di Padang Pariaman memperlihatkan betapa perempuan dan barisan bundo kanduangnya tak berdaya, dan tak lebih dari obyek, walaupun pelopor pemberdayaan perempuan di Minangkabau seperti Hajjah Rahmah El-Yunusiah (bidang pendidikan), Rohana Kudus dan Rasuna Said atau yang lainnya sudah melantunkan protes mereka secara kongkrit, ternyata tidak terlalu menggema bila sudah dihadapkan dengan hukum adat.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi atau ilmu tentang metode, mempunyai arti suatu studi logis dan sistematis tentang prinsip-prinsip yang akan mengarah penelitian, dengan demikian metodologi dimaksud sebagai suatu prinsip dasar berhasilnya penelitian yang merupakan suatu sistem atau cara memperoleh data-data guna mengetahui lebih jelas suatu permasalahan yang dihadapi sehingga dapat dirumuskan suatu kesimpulan akhir dalam memecahkan masalah tersebut.

3.1 Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan yuridis empiris.

- a. Yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau secara hukum
- b. Empiris berasal dari Inggris : *Empirical*, artinya bersifat nyata

Maka pendekatan empiris dimaksudkan adalah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum khususnya hukum adat yang nyata atau sesuai dengan kenyataan dalam masyarakat.

3.2 Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dari tesis ini merupakan penelitian studi yang menguraikan secara deskriptif analisis/melihat gambaran atau fakta-fakta yang ada di lapangan, yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin.

3.3 Penentuan Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat hukum adat Kabupaten Tanah Datar.

Dalam pengambilan sampel ditentukan melalui *purposive sampling* dengan tujuan untuk melihat persyaratan dan ciri-ciri tertentu dari objek yang akan diteliti, yaitu teknik yang biasa dipilih karena alasan biaya, waktu dan tenaga sehingga tidak bisa mengambil sampel dalam jumlah besar.

Dari 75 Nagari yang ada di Kabupaten Tanah Datar, penulis mengambil 2 (dua) Nagari saja yaitu :

1. Nagari Padang Gantiang
2. Nagari Tanjuang Sungayang

Alasan penulis mengambil lokasi penelitian 2 (dua) nagari tersebut, karena kedua Nagari tersebut masing-masing telah mewakili 2 (dua) corak pemerintahan dalam masyarakat adat yang terdapat di Minangkabau yaitu : Corak Pemerintahan Koto Piliang dan Corak Pemerintahan Bodi Chaniago. Karena banyaknya anggota masyarakat adat yang dapat dijadikan sample, maka diadakan juga pemilihan secara *purposive sampling*, dengan menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam memilih unsur-unsur dari sample, maka yang dijadikan sample adalah mereka yang tergolong tokoh masyarakat adat yang dikenal dengan *tokong tali sapilin* yaitu : Unsur Cerdik Pandai, Unsur Ninik Mamak, Unsur Alim Ulama dari setiap Nagari tersebut di atas.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat adat dan anggota masyarakat adat yang menguasai tanah ulayat atau bekas tanah ulayat di Nagari Padang Gantiang dan Nagari Tanjuang Sungayang, Kabupaten Tanah Datar yang merupakan lokasi penelitian, sedangkan data skunder diperoleh dari berbagai dokumen-dokumen yang tersedia di perpustakaan baik dari perorangan maupun instansi pemerintah.

Dalam penelitian ini digunakan tehknik wawancara mendalam (*in-depth*) interview serta terstruktur, untuk menggali sebanyak-banyaknya informasi yang ingin diperoleh dari intervieweer yang dalam penelitian ini dijadikan nara sumber, atau alat/instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data.

3.5 Teknik Analisis

Setelah data terkumpul dari penelitian yang dilakukan maka terhadap semua data tersebut dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Editing data, yaitu mengedit atau memeriksa data-data yang dianggap perlu untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian ini.
- b. Pengolahan data yaitu data-data yang telah diedit telah dikelompokkan dan disusun dengan kategori yang telah dibuat.
- c. Data yang dikelompokkan dalam komponen yang telah disesuaikan dengan masalah-masalah dan tujuan penelitian.

Semua hasil yang diperoleh dianalisis dengan metode kualitatif. Dengan memperhatikan pendapat pakar yang penulis kutip, maka hasil analisis ditafsirkan untuk dirumuskan menjadi penemuan dan kesimpulan penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Secara umum Minangkabau terletak pada pantai barat Pulau Sumatera, yang secara ketatanegaraan termasuk Propinsi Sumatera Barat, menurut keadaan topografis Minangkabau dapat dibedakan dengan daerah Darek (daratan/pegunungan) dan daerah Rantau (pesisir), tetapi menurut corak pemerintahan adat Minangkabau dapat dibedakan dengan tiga daerah yaitu : Daerah yang kepemimpinannya memakai kepemimpinan Bodi Chaniago yaitu Luhak Agam, corak kepemimpinan Koto Piliang yaitu Luhak Limo Puluah Kota, dan corak kepemimpinannya Koto Piliang sekaligus Bodi Chaniago yaitu Luhak Tanah Datar.

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas bahwa lokasi penelitian hanya terdiri dari 2 (dua) nagari yaitu Nagari Padang Gantiang dan Nagari Tanjung Sungayang, dimana kedua nagari ini terdapat di daerah Luhak Tanah Datar dan masuk dalam teritorial Kabupaten Tanah Datar, Propinsi Sumatera Barat. Sengaja hanya 2 (dua) nagari tersebut peneliti pilih, karena kedua nagari tersebut terdapat kedua corak kepemimpinan adat Minangkabau, yaitu corak kepemimpinan Bodi Chaniago dan Koto Piliang.

Tabel 1
Daftar Nagari di Kabupaten Tanah Datar

No	Nama Nagari	No	Nama Nagari
1	Aia Angek	39	Paninjauan
2	Andeleh-Barulah Bukik	40	Panyalaian
3	Andeleh-Batipuah	41	Pandai Sikek
4	Atar	42	Parambahan
5	Balai Tengah	43	Pasia Laweh
6	Balimbiang	44	Pitalah
7	Batipuah Ateh	45	Rambatan
8	Batipuah Baruah	46	Rao Rao
9	Baringin	47	Salimpauang
10	Barulak	48	Situmbuak
11	Batu Basa	49	Supayang
12	Batu Bulek	50	Sabu
13	Batu Taba	51	Sawah Tengah
14	Bungo Tanjuang	52	Simabua
15	Buo	53	Simpuruik
16	Cubadak	54	Simawang
17	Gunuang Rajo	55	Singgalang
18	Gurun	56	Sumpu
19	Jaho	57	Suruaso
20	Koto Baru X Koto	58	Sungayang
21	Koto Bari Sei. Tarab	59	Sungai Patai
22	Koto Laweh	60	Sungai Tarab
23	Koto Tengah	61	Sungai Jambu
24	Koto Tuo	62	Sumaniak
25	Kumango	63	Talang Tengah
26	Labuah	64	Tambangan
27	Lawang Mandahiliang	65	Taluak
28	Limo Kaum	66	Tanjung Sungayang
29	Lubuak Jantan	67	Tanjung Barulak-Btp
30	Malalo	68	Tanjung Barulak-Srs
31	Minangkabau	69	Tanjung Bonai
32	Pariangan P.P	70	Tanjung Alam
33	Padang Gantiang	71	Tabek-Pariangan
34	Padang Laweh Sei. Tarab	72	Tabek Patah
35	Padang Laweh Batipuah	73	Tapi Selo
36	Padang Magek	74	Tigo Jangko
37	Pegaruyung	75	Tigo Koto
38	Pangiang		

Sumber Data : Pemda Tingkat II Kabupaten Tanah Datar

4.1.1. Nagari Padang Gantiang

Nagari Padang Gantiang merupakan tanah dataran yang membujur dari barat ke timur dengan luas areal 33 km² atau 3.833 ha, dengan panjang 11 km dan lebar 3 km, terletak ditinggikan 700 meter diatas permukaan laut.

Kenagarian ini adalah salah satu nagari dari 6 nagari yang tergabung menjadi satu dalam satu kecamatan yaitu Kecamatan Tanjung Emas. Jarak Nagari ini dengan ibu Kecamatan 11 km dan dengan ibu Kabupaten (Batusangkar) 18 km, kalau kita lihat bentuk kenagarian ini dari tempat tinggi, berbentuk sebuah kuali karena dikelilingi oleh bukit-bukit sekaligus menjadi batas-batas dengan daerah lain sekitarnya.

Batas-batasnya :

- Sebelah Utara : berbatas dengan Bukit Pagie dan bukit Palano
- Sebelah Selatan : berbatas dengan bukit Pananggadiang
- Sebelah Barat : berbatas dengan bukit Ponte Parutan
- Sebelah Timur : berbatas dengan Bukit Kandang Baparik.

Keadaan tanah dikenagarian ini boleh dikatakan masuk daerah subur, berkat adanya beberapa batang air yang mengalir yaitu sungai Selo (batang selo).

Sesuai dengan asal usul penduduk Minangkabau umumnya, maka penduduk Padang Gantiang juga berasal dari daerah Paringan Padang Panjang.

Takalo sumua Lubuak Alung, alun ba Toboh Pakandangan, alun basunu Kuraitaji, alun banareh sungai Limau, adat jo syarak alah juo, nan turun dari nenek nan baduo, Datuak Parapati nan sabatang, duo jo Datuk Katamanggungan, nan

manyusun adat jo limbago, nan mambuek barih jo balabeh, iyo dinagari Padang Panjang.

Sinanlah Datuak Parapatih nan sabatang, mambari bungka jo piawai, mambuek cupak nan duo baleh, sinanlah Datuak Katamanggungan menurunkan adat jo pusako, mambilang luak jo lareh, maetong koto jo nagari.

Akhirnya nenek moyang penduduk Minangkabau setelah turun dari Paringan Padang Panjang, sesuai dengan perkembangan penduduknya menyebar ke selingkar lereng gunung Merapi, mencari tempat yang elok, mencari tanah yang subur, mencari rimbo nan kadilateh ataupun rawang nan kadibubuih, kadijadikan sawah jo ladang, untuk kadimakan anak kamanakan, kamangakkan adat jo pusako. Maka dengan takdir Tuhan pada masa itu sampailah 4 ekspedisi di bukit-bukit yang mengelilingi Padang Gantiang, antara lain Bukit Pagie, Bukit Rimbang Kandang Parit, Bukit Parutan dan dari beberapa jurusan lain dikemudiannya.

Di waktu mereka sudah mulai turun ke daerah dataran Padang Gantiang ini, maka mereka yang berasal dari Bukit Pagie tersebutlah Datuak Sinaro yang membangun suku Kutianyir, yang berasal dari Bukit Rimbang (tepatnya Mejan Baliang) tersebutlah Datuak Kondo Majo Indo yang membangun suku Caniago, yang berasal dari bukit Kandang parit tersebutlah Datuak Rangkayo Batuah yang membangun suku Sembilan, dan yang berasal dari bukit Purutan tersebutlah Datuak Bandaro Besar yang membangun suku Tujuh.

Jurusan lain ialah istimewa Tuan Kadhi dulunya bergelar Datuak Maruhun Sati, takato turun dari Pariangan Padang Panjang turun ke Sawah Kareh sampai

Talago Gunuang, manapekka Padang Gantiang dan tersebut pula sebagian dari suku Tujuh dan datang dari Sawah Kareh.

Suku Rajo Dani turun dari Lima Kaum ka Saruaso dari Saruaso ka Sungai Ameh, baru turun di Padang Gantiang dari Bukit Parumahan termasuk Datuak mantiko Rajo yang membangun suku Rajo dani. Adapun tempat yang mula-mula mereka tempati sebagai fitrah manusiawi : condong salero ka nan lamak, condong mato ka nan rancak, condong hati kanan ka tuju, niat samulo ninik moyang mencari tampek nan elok. Mencari tanah nan subur, tasabuiklah Koto Alam dahulu banamo Koto Baampek Suku dan Koto Gadang nan Koto Alam, tanda usali nagari wajib barumah di duo Koto itu. Karena kuasa Tuhan yang berkehendak, utang manusia manapati, tasabuiklah Padang Gantiang Batigo Koto, lareh nan Gadang balareh nan panjang, nan katigo lareh Rajo Dani, itulah Padang Gantiang nan seutuhnya nan menjadi nagari 5 suku, suku ampek jurai, tiap suku mempunyai penghulu Suku Adat dan 4 penghulu Andiko, maka di Padang Gantiang ada 25 orang datuak-datuak kerapatan adat, ditambah dengan 5 orang Sandi Tuan Kadhi.

Demikianlah kerapatan adat di Padang Gantiang berjumlah 30 orang “Kusuik nan kamanyalasaikan, karuah nan kapajaneh” dalam adat istiadat sako jo pusako.

*Tasindorong jajak manurun
Tatukiak jajak mandaki
Adat jo syarak nan tasusun
Bumi sanang padi menjadi*

Kenagarian Padang Gantiang termasuk corak kepemimpinan Koto Piliang yang terdiri dari 5 (lima) suku yaitu : suku Sembilan, suku Kutianyir, suku Tujuh Melayu dan suku Rajo Dani.

Tabel 2
Daftar Suku di Padang Gantiang

No	Penghulu	Suku	Corak Kepemimpinan
1	DT. Panduku Sianso	Sembilan	Koto Piliang
2	Dt. Balai	Kutianyir	Koto Piliang
3	Dt. Majo Indo	Tujuh	Koto Piliang
4	Dt. Indo Marajo	Melayu	Koto Piliang
5	Dt. Berain	Rajo Dani	Koto Piliang

Sumber Data : Pemda Tingkat II Kabupaten Tanah Datar

4.1.2. Nagari Tanjuang Sungayang

Nagari Tanjuang Sungayang merupakan dataran tinggi yang membujur dari utara ke selatan, yang luas areal 81 km², atau 8.731 Ha, dengan panjang 31 km dan lebar 12 km. Terletak diketinggian 900 meter di atas permukaan laut, kenagarian ini adalah salah satu dari 9 Nagari yang tergabung dalam Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah datar, jarak Kenagarian ini dengan ibu Kecamatan hanya 1 kilometer, jarak dengan ibukota kabupaten 8 kilometer, jumlah penduduk laki-laki 602 orang, perempuan 674 orang.

Tabel 3
Daftar Suku di Tanjung Sungayang

No	Penghulu	Suku	Corak Kepemimpinan
1	DT. Tumangguang Kaciak	Chaniago	Bodi Chaniago
2	DT. Rajo Damuanso	Pisang	Bodi Chaniago
3	DT. Dowo Lelo Angso	Melayu	Bodi Chaniago
4	DT. Bijo Kiamang	Mandahailiang	Bodi Chaniago
5	DT. Bijo Wanputiah	Pawyalai	Bodi Chaniago
6	DT. Bagindo	Pisang	Bodi Chaniago

Sumber Data : Pemda Tingkat II Kabupaten Tanah Datar

4.2. Kedudukan dan Fungsi Tanah Ulayat

Pengaturan mengenai hukum pertanahan yang berlaku di Indonesia mengalami dua periode yang sangat berlainan antar yang satu dengan yang lainnya. Pada masa penjajahan, di Indonesia terdapat dualisme hukum di bidang pertanahan, yang membedakan hukum yang berlaku bagi golongan-golongan penduduk. Pada masa itu hukum pertanahan disusun berdasarkan sendi-sendi hukum pemerintah jajahan yang bertentangan dengan kepentingan rakyat. Hukum pertanahan dibuat semata-mata untuk kepentingan pemerintah jajahan yang bertentangan dengan kepentingan rakyat. Hal ini misalnya dapat dilihat pada pemberian hak eigendom yang bersifat mutlak yang tidak dapat diganggu gugat. Hak eigendom adalah hak yang paling sempurna atas suatu benda. Seseorang yang mempunyai hak eigendom

atas suatu benda dapat berbuat apa saja dengan/benda itu sepanjang tidak melanggar hak orang lain.

Di lain pihak untuk golongan bumiputera diberlakukan ketentuan hukum menurut hukum adatnya masing-masing yang didalamnya tidak mengenal adanya suatu hak milik perorangan yang bersifat mutlak. Dipandang secara keseluruhan, maka hukum adat untuk bumiputera ini dianak-tirikan, seolah-olah tidak ada dalam pemerintahan, karena pemerintah jajahan pada waktu itu berpendapat bahwa ketentuan hukum tanah adat tidak menguntungkan kepada politik penjajahan Hindia Belanda.

Khusus mengenai tanah ulayat, Van Vollen Hoven berpendapat sebagai berikut : "Tanah ulayat merupakan domein negara bebas, berarti milik negara kolonial".¹² Dari pendapat yang dikemukakan tersebut, dapat dilihat bahwa tampaknya pada masa lampau tanah ulayat secara yuridis dianggap sebagai milik negara, yang dalam hal ini adalah pemerintah jajahan Hindia Belanda, yang secara praktis didiami atau dikuasai masyarakat hukum adat.

Secara yuridis formal, sejak tanggal 24 September 1960, pengaturan-pengaturan hukum tanah pemerintah Hindia Belanda dihapuskan, dengan diundangkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraris. Sejak saat itu secara otomatis berakhirilah dualisme di bidang hukum tanah yang bercirikan feodalisme, kapitalisme, dan kolonialisme dan sebagai gantinya

¹² Syamsul Bahri, *Pendaftaran Tanah Ulayat Transaksi dan Hak Pertanggungan*, Padang, 1979, hal. 2.

berlakulah hukum baru yang disusun berdasarkan sendi-sendi hukum adat. Keadaan ini membawa dampak positif bagi bangsa Indonesia, karena hal itu berarti dicabutnya ketentuan-ketentuan dari :

1. Agrarische Wet (S. 1870 – 55)
2. Semua pernyataan domein, yang antara lain :
 - a. Domeinverklaring yang tersebut dalam Pasal 1 Agrarisch Besluit (S. 1870 – 118).
 - b. Algemeene Domeinverklaring yang tersebut dalam S. 1875 – 1919a.
 - c. Domeinverklaring untuk Karesidenan Manado yang tersebut dalam Pasal 1 dari S. 1877 – 55
 - d. Domeinverklaring untuk Sumatera yang tersebut dalam Pasal 1 dari S. 1874 – 94f.
 - e. Domeinverklaring untuk Residentie Zuider en oosterafdeling van Borneo yang tersebut dalam Pasal 1 dari S. 1888 – 58.
3. Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia
 Sepanjang mengenai bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hipotik yang masih berlaku pada saat mulai berlakunya undang-undang ini.
4. Ketentuan hukum tanah adat tertulis yang berupa :
 - a. Agrarisch Eigendom (S. 1872 – 117 dan S. 1873 – 38)
 - b. Hukum Tanah Swapraja

Hal ini mengakibatkan warga negara Indonesia mempunyai hubungan dengan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak serta untuk memanfaatkan hasilnya.

Dalam ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 60 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) sekarang, terdapat pengakuan positif dan yuridis terhadap hukum adat, sebagai mana tercantum dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 3 UUPA. Ketentuan dari kedua pasal tersebut didasari oleh Pasal 5 UUPA yang bunyinya sebagai berikut :

Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan-peraturan lain, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang berdasarkan pada hukum agama.¹³

Hak menguasai dari negara seperti yang ditentukan Pasal 33 (3) Undang-Undang Dasar 1945, dalam pelaksanaannya dikuasakan kepada masyarakat hukum adat dimana dalam pelaksanaan hak tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara. Ketentuan tersebut terdapat pada Pasal 3 UUPA yang berbunyi sebagai berikut :

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara

¹³ Boedi Harsono, *Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria*, Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah, Jakarta, 1988, hal. 7.

yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.¹⁴

Dengan dicantumkannya hak ulayat dalam UUPA, maka hal itu dapat diartikan sebagai suatu pengakuan terhadap keberadaan dan keberlakuan hak ulayat itu di dalam masyarakat Indonesia. Dengan demikian maka hak ulayat itu akan diperhatikan sepanjang hak tersebut menurut kenyataannya masih ada pada masyarakat hukum yang bersangkutan, dan sepanjang ketentuan-ketentuannya tidak bertentangan dengan kepentingan yang lebih luas. Syamsul Bahri mengatakan tentang kedudukan tanah ulayat terutama di Minangkabau sebagai berikut :

Kedudukan tanah ulayat dulu dan kini secara yuridis formil antara siang dan malam, secara filosofis kenyataannya sesuai dengan pepatah adat, tak lekang dek paneh, tak lapuak dek hujan, kaateh bapucuak, kabawah baurek tunggang, nan ureknyo taunjua ka bumi, istimewa di Ranah Minang.¹⁵

Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa jika ditinjau dari segi yuridis formal telah terdapat kemajuan bagi kedudukan dari tanah ulayat, terutama di daerah Sumatera Barat. Ketentuan tanah ulayat menurut adat masih terpelihara dan digunakan oleh masyarakatnya. Hal ini disebabkan oleh karena pada zaman penjajahan Hindia Belanda dahulu tidak ada pengakuan terhadap tanah ulayat. Walaupun pada masa tersebut tidak terdapat hukum tertulis yang mengakuinya, akan tetapi masyarakat Minangkabau tetap menggunakan ketentuan adatnya dalam pengaturan ulayatnya.

¹⁴ *Ibid*, hal. 6.

¹⁵ Syamsul Bahri, *Op. cit*, hal. 6.

Keadaan sekarang sudah berbeda, hak ulayat sudah diakui keberadaannya secara tertulis dalam UUPA. Dengan demikian maka jelaslah bahwa masyarakat Minangkabau telah melaksanakan ketentuan adat dalam hal pengaturan tanahnya sejak masa kolonial sampai saat ini. Walaupun zaman telah mengalami perubahan serta telah terjadi perkembangan dibidang kekerabatannya, akan tetapi sepanjang mengenai pengaturan tanah ulayat, masih tetap tidak berubah.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat dilihat bahwa dalam Undang-Undang Pokok Agraria dikatakan bahwa penggunaan tanah dikaitkan dengan fungsi sosial dari tanah tersebut, yang dalam pelaksanaannya harus memperhatikan kepentingan nasional dan negara. Dalam ketentuan adat Minangkabau, tanah juga berfungsi untuk kepentingan bersama. Sejak dahulu sampai saat ini tanah ulayat Minangkabau berfungsi untuk kesejahteraan para anak kemenakan dari pemilik ulayat yang bersangkutan. Tanah ulayat berfungsi sebagai sumber penghidupan para anggota masyarakat hukum adat. Jadi sebenarnya yang membedakan disini adalah tujuan dari penggunaan tanah tersebut. Kalau dalam Undang-Undang Pokok-pokok Agraria penggunaan tanah tidak boleh terlepas dari fungsi sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan memperhatikan kepentingan nasional dan negara. Dalam tanah ulayat tujuan penggunaannya adalah untuk kesejahteraan para anak kemenakan. Dengan kata lain sebatas anggota-anggota kaum sebagai pemilik tanah ulayat kaum, anggota-anggota suku sebagai pemilik tanah ulayat suku, maupun masyarakat nagari yang merupakan pemilik bersama dari suatu tanah ulayat nagari.

4.3. Penguasaan dan Pengolahannya

Di dalam lingkungan kekerabatan Minangkabau pada pertalian sanak keluarganya telah terjadi perkembangan kearah susunan baru. Perkembangan di dalam lingkungan ini bukan merupakan suatu perkembangan yang diciptakan dan dipaksakan oleh pemerintah. Perkembangan tersebut merupakan sesuatu yang benar-benar timbul dan berkembang serta dikehendaki oleh kesadaran hukum dari masyarakat sendiri, oleh karena memang sudah sedemikian patutnya di dalam menyelaraskan diri dengan suasana kehidupan Indonesia modern.

Minangkabau yang pada zaman dahulunya tertutup karena adat yang kuat, dari hari ke hari telah semakin terbuka. Hubungan dengan daerah-daerah lain sudah semakin baik karena hubungan lalu lintas sudah semakin baik. Demikian juga pendidikan yang sudah semakin maju membawa masyarakat kepada taraf pemikiran-pemikiran yang lebih logis. Di samping itu pemikiran-pemikiran di bidang sosial ekonomi sudah semakin berubah pula sesuai dengan perubahan zaman. Pertalian-pertalian yang sedemikian erat dalam kaum dewasa ini tampak semakin kendur, walaupun susunan yang lama masih tetap ada dan dipertahankan. Susunan lama yang tradisional memang masih ada, akan tetapi dewasa ini sudah tidak seerat susunan yang ada di masa lampau.

Ditengah-tengah masyarakat Minangkabau terdapat tiga macam kesadaran hukum. Sumbernya adalah norma-norma agama, norma-norma adat dan norma-norma hukum yang tertulis yang berjalan searah dengan perkembangan jaman dan

masyarakat. Ketiga ketentuan tersebut merupakan “*Tigo Tali Sapilin*”, seperti yang dinyatakan oleh ketentuan adat yang mengatakan sebagai berikut :

*“Adat basandi syarak
Syarak basandi Kitabullah
Adat mangato, syarak mamakai
Syarak telah lazim, adat telah kawil”*

Ketiga ketentuan ini berjalan dengan baik dalam masyarakat. Di samping itu dari ketentuan perundang-undangan negarapun harus dijalankan ditengah-tengah masyarakat. Diantara ketiga norma itulah pengaturan tanah ulayat Minangkabau dilaksanakan oleh pemiliknya, guna memenuhi kepentingan-kepentingan masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 ayat (3) diatur mengenai penguasaan tanah oleh negara, dimana negara diberikan wewenang untuk menguasai tanah yang penggunaannya diperuntukkan kembali bagi seluruh rakyat. Dalam hukum adat Minangkabau pun hal seperti itu sebenarnya sudah ada, dimana tanah ulayat dikuasai oleh pemimpin-pemimpin adat seperti penghulu atau mamak kepala waris yang penggunaannya diperuntukkan bagi kepentingan anak kemenakan. Dengan demikian dapat dilihat bahwa pada prinsipnya penguasaan tanah ulayat tidak berbeda dengan ketentuan-ketentuan negara.

Dalam ketentuan adat disebutkan bahwa tanah ulayat Minangkabau terdiri dari :

- a. Tanah Ulayat Kaum.
- b. Tanah Ulayat Suku.

c. Tanah Ulayat Nagari.

Pembagian seperti ini masih tetap diakui oleh masyarakat Minangkabau. Hanya saja sekarang ini di wilayah Sumatera Barat, yang terlihat hanya kanagarian saja yang masih memiliki ulayat. Tanah Ulayat untuk kaum dan suku sudah hampir tidak ada lagi, karena tanah-tanah ulayat kaum dan suku tersebut yang pada prinsipnya digunakan untuk kepentingan bersama, sudah terpakai oleh para anak kemenakan sebagai ganggam bauntuak pagang bamasing. Dalam pembicaraannya dengan kami di Padang, Prof. Mr. Herman Sihombing mengatakan bahwa sekarang ini sudah tidak banyak lagi tanah ulayat yang terdapat di Minangkabau, karena tanah ulayat tersebut sudah banyak yang dikerjakan. Tanah ulayat pada nagari yang tertinggal hanyalah ulayat untuk memungut hasil hutan, sungai dan lain-lain. Dan hal itupun sudah jarang pula karena banyaknya hutan-hutan yang diambil oleh negara. Hutan nagari masih ada, akan tetapi jumlahnya sudah sangat sedikit, dan yang tersisa itulah yang dinamakan ulayat nagari.

Selanjutnya dapat dilihat bahwa harta pusaka dalam bentuk tanah ulayat tidak berkembang luasnya, karena jumlahnya tetap, sedangkan jumlah anggota masyarakat pemiliknya terus bertambah dari tahun ke tahun. Dalam penjelasan-penjelasan di muka telah diuraikan bahwa para anak kemenakan yang memegang ganggam bauntuak, memperlakukan tanah ulayat seolah-olah sebagai hak miliknya sendiri. Jika ia meninggal dunia maka pengolahan tanah ulayat tersebut akan diteruskan oleh anak-anaknya. Dari sini dapat terlihat bahwa semakin lama semakin kuat hubungan antara anggota kaum yang memegang ganggam bauntuak dengan tanah. Mereka

memperlakukan harta tersebut efektif dan seolah-olah merupakan miliknya sendiri. Hal ini menyebabkan semakin tipisnya hubungan kepala kaum dengan tanah yang diolah para kemenakan tersebut. Dengan demikian keadaan ini mengarah kepada dapat dibagi-bagikannya tanah ulayat/pusaka itu secara materiil, walaupun secara formiil tanah tersebut masih merupakan tanah ulayat sebagai suatu kesatuan.

Dahulu hubungan masyarakat hukum adat sebagai suatu kesatuan dengan tanah ulayatnya adalah erat, karena pada masa tersebut mereka bersama-sama mengerjakan dan mengolah tanah ulayat dan bersama-sama pula menikmati hasilnya. Kehidupan keluarga dijalankan dalam rumah-rumah gadang sebagai alat pemersatu dan tempat berkembangnya anggota kaum. Akan tetapi keadaan yang dapat diamati sekarang sudah berbeda. Pada saat ini hubungan pribadi manusia dengan tanah ulayat itulah yang terkuat. Dengan lain perkataan dapat dikatakan bahwa kalau dahulu unsur kolektif atau kepentingan seluruh anggota kaum sebagai suatu kesatuan yang diutamakan, maka keadaannya yang sekarang telah berbeda. Pada dewasa ini unsur individuallah yang berlaku. Selanjutnya ditambah pula dengan adanya ganggam bauntuak dalam pemilikan harta pusaka, yang dalam penjelasan-penjelasan di muka disebutkan dapat diwariskan kepada anak. Dengan adanya kenyataan ini maka makin berkuranglah kekuasaan dari masyarakat hukum adat atas tanah ulayatnya. Keadaan ini ditambah pula dengan faktor kehidupan yang sulit dari si pemegang harta pusaka itu, sehingga mereka sering memperlakukan harta pusaka tersebut sebagai milik pribadinya.

Dalam ketentuan Pasal VI ketentuan-ketentuan konversi dalam U.U.P.A., salah satu hak yang tercantum di dalamnya adalah hak ganggam bauntuak. Menurut ketentuan adat, hak ini pelaksanaannya ada di tangan penghulu suku atau penghulu kaum. Sedangkan penggunaannya diberikan kepada anggota kaum atau suku sebagai hak pakai adat. Akan tetapi karena sekarang penggunaannya telah dilakukan secara efektif oleh para anak kemenakan, sebagai akibatnya maka kekuasaan atas “Kerbau tegak kubangan tinggal, tanjung putus pulau beralih”.¹⁶

Dalam hal ini terjadinya pergeseran-pergeseran di dalam pemakaian ulayat, maka para ninik mamak mempunyai wewenang untuk menentukan status yang akan diberikan kepada anggota-anggota masyarakat hukum adat. Jika terjadi sengketa dalam penguasaan dan pengolahan tanah ulayat ini, maka para ninik mamak yang akan menyelesaikannya melalui musyawarah yang diadakan di Kerapatan Adat Nagari (K.A.N.).

Kerapatan Adat Nagari merupakan lembaga perwakilan permusyawaratan permufakatan adat tertinggi yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat di tengah-tengah masyarakat nagari di Sumatera Barat. Hal mengenai Kerapatan Adat Nagari ini diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1983 Tentang Nagari serta Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

¹⁶ Amir Syarifudin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta, 1984, hal. 216.

Kerapatan Adat Nagari (K.A.N) adalah suatu badan yang dalam keberadaannya di wilayah Sumatera Barat menyelesaikan masalah-masalah tanah ulayat dari dahulu sampai sekarang di setiap nagari. Organisasi keberadaannya diatur pada Pasal 4 Perda Sumatera Barat No13 Tahun 1983 yang berbunyi :

1. Di setiap nagari dikukuhkan Kerapatan Adat Nagari yang telah ada dan hidup di Nagari Sumatera Barat.
2. Kerapatan Adat Nagari terdiri dari unsur-unsur penghulu adat yang berlaku sepanjang adat dalam masing-masing nagari sesuai dengan sistem penerapannya antara lain :
 - a. Pucuk Adat atau Ketua
 - b. Datuk-datuk Kaampek Suku
 - c. Penghulu-penghulu Andiko
 - d. Urang Ampek Jinih
3. Kerapatan Adat Nagari dipimpin oleh seorang ketua atau oleh pucuk adat.

Adapun personil yang duduk dalam KAN adalah para penghulu-penghulu suku dan pemuka-pemuka adat yang bersangkutan. Untuk itu disamping sebagai sarana peradilan terendah dan tertinggi dalam adat, di nagari ia juga merupakan wakil dari tiap-tiap suku untuk mewakili inspirasi dari kaumnya masing-masing. Mengenai persengketaan-persengketaan yang terjadi mengenai tanah ulayat, Mr. Herman Sihombing dalam suatu pembicaraannya dengan kami mengatakan sebagai berikut :

“Untuk menyelesaikan sengketa tanah ulayat yang terbaik adalah dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari. Hal ini antara lain disebabkan karena penghulu-penghulu

tersebut lebih mengetahui milik siapa tanah yang dipersengketakan tersebut, karena sudah jelas batas-batasnya baik yang merupakan batas alam maupun batas-batas yang dibuat oleh manusia". Jadi dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam rangka penyelesaian sengketa mengenai tanah ulayat, maka pertama sekali harus dilakukan penyelesaian menurut adat yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari yang ada di setiap kanagarian. Apabila dengan jalan tersebut tidak diperoleh kata sepakat, maka barulah perkara tersebut dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri guna memperoleh penyelesaian menurut hukum yang berlaku.

Tugas-tugas dari KAN diatur dalam Pasal 7 Perda No. 13 Tahun 1983 yang berbunyi :

(1) Kerapatan Adat Nagari mempunyai tugas

- A. Menurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan sako dan pusako
- B. Menyelesaikan perkara-perkara perdata adat dan istiadat
- C. Mengusahakan perdamaian dan memberikan kekuatan hukum terhadap anggota-anggota masyarakat yang bersengketa serta memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut sepanjang adat.
- D. dan seterusnya.

Secara garis besarnya dalam menjalankan program pemerintah di dalam bidang pertanahan, para ninik mamak yang duduk di KAN mempunyai dua wewenang, yaitu :

- a. Wewenang di bidang pertanahan menurut hukum adat.

b. Wewenang dalam pelaksanaan U.U.P.A.

Dari uraian-uraian di atas mengenai Kerapatan adat Nagari, maka dapat dilihat bahwa peranan ninik mamak dalam kelembagaan pada K.A.N. sangat menentukan dalam rangka kelancaran pembangunan, baik pada waktu lampau ataupun pada masa dewasa ini. Kerapatan Adat Nagari merupakan suatu lembaga yang diwarisi secara turun temurun dalam masyarakat. K.A.N. telah memberikan sumbangan yang sangat berharga terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat hukum adat, sehingga keberadaannya perlu dipelihara dan dilembagakan dengan memberikan fungsi, kedudukan, beserta peranan yang sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan ketatanegaraan serta tuntutan pembangunan nasional.

4.4. Perbuatan Hukum yang Dapat Dilakukan Atas Tanah Ulayat

Dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, secara formil berlaku suatu unifikasi hukum tentang tanah pada khususnya. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria tersebut ditegaskan bahwa hukum adat diakui keberadaannya sebagai hukum yang mengatur masalah pertanahan.

Mengenai pengaturan tanah ulayat yang terdapat di ketiga luhak yang ada di Minangkabau pada prinsipnya adalah sama. Hanya tetapi ada sedikit variasi saja dalam pelaksanaannya. Akan tetapi ketentuan pokoknya tetap sama, seperti yang digambarkan oleh pepatah adat yang berbunyi : "Adat itu sebatang pusakonya". Bapak Sjahmunir. A.M., SH., dalam percakapannya di Padang mengatakan bahwa secara jujur kita harus mengakui, bahwa Undang-Undang Pokok Agraria itu dibuat

untuk menciptakan kepastian hak dan kepastian hukum. Hal ini berarti, setiap orang dapat memiliki hak atas tanah secara individu, pribadi-pribadi. Dalam pengertian tersebut, U.U.P.A menjuruskan kepada individualisiiring dalam penguasaan tanah. Akan tetapi kita perlu memperhatikan bahwa inti yang terkandung dalam tanah ulayat Minangkabau tidak menghendaki tanah itu terkeping-keping menjadi individu-individu. Jadi tanah ulayat itu tetap utuh menjadi kepunyaan bersama karena itulah faktor yang menyatukan mereka. Kalau dibandingkan kedua ketentuan tersebut, sebenarnya terdapat ketidakserasian. Di satu pihak U.U.P.A ingin memetak-metakkan tanah menjadi bagian-bagian kecil milik pribadi-pribadi. Sedangkan di lain pihak ketentuan adat Minangkabau ingin mempertahankan kesatuan atas tanah agar supaya tidak terpecah-pecah. Jadi secara prinsip sebenarnya kedua ketentuan itu berbeda, namun ada hal yang dapat diambil dari U.U.P.A ini, yaitu adanya upaya untuk menciptakan suatu kepastian hukum. Hal itu berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Peraturan Pendaftaran Tanah yang merupakan pelaksana dari U.U.P.A. dalam P.P 10/1961 tersebut tersimpul suatu ketentuan, bahwa semua tanah yang ada tanpa kecuali harus didaftarkan guna terciptanya suatu kepastian hukum dan kepastian hak.

Sebagaimana yang kami kemukakan dalam Bab II, menurut ketentuan adat Minangkabau, pada prinsipnya terhadap tanah ulayat tidak boleh diadakan pemindahan hak kepada pihak ketiga. Akan tetapi jika keadaannya sangat mendesak dan tidak ada jalan keluar lain maka tanah ulayat boleh digadaikan dengan alasan :

a. Rumah Gadang Katirisan

- b. Gadih Gadang Indak Balaki
- c. Mayat Terbujur Ditengah Rumah
- d. Managakkan Batang Tarandam.

Hal penting yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa penggadaian tersebut harus disetujui oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Jika berbicara mengenai masalah gadai, maka dapat dilihat ketentuan dari Undang-Undang No. 56/prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Dalam Pasal 7 disebutkan, bahwa setelah lewat dari 7 tahun maka gadai akan dihapus dengan sendirinya. Adapun tujuan dari ketentuan ini adalah untuk menghindarkan terjadinya penghisapan oleh manusia. Praktek-praktek gadai yang terjadi di Pulau Jawa terlihat sangat merugikan pihak pemilik tanah. Karena terdesak kebutuhan uang mereka menggadaikan tanahnya, sehingga mereka akan terikat pada lintah darat yang bertindak sebagai pelepas uang. Akan tetapi di Sumatera Barat dari dahulu sampai sekarang tidak demikian halnya. Gadai tersebut bersifat tolong menolong dan selalu ditebusi tanpa terikat pada suatu jangka waktu tertentu. Hal ini sesuai dengan ketentuan adat yang berbunyi : “ gadai ditebusi, jual dipalalui”. Hal ini berarti bahwa dalam jual beli, lepas begitu saja tidak ada batas waktu untuk mengembalikan. Sedangkan dalam gadai harus ditebus kembali, dan ini merupakan ketentuan adat. Jadi sebenarnya gadai menurut ketentuan yang dianut oleh Masyarakat Minangkabau berbeda dengan ketentuan gadai yang diatur oleh Pasal 7 Undang-Undang No. 56 Tahun 1960 tersebut. Di Minangkabau gadai dilakukan atas nama keluarga, dilakukan antara satu famili dan fungsinya untuk melakukan tolong menolong.

sehingga tidak ada unsur pemerasan. Di samping itu orang yang menerima gadai dari anak kemenakannya akan merasa berdosa apabila ia mengambil kembali tanahnya dari anak kemenakannya tersebut tanpa tebusan. Ia tahu bahwa anak kemenakannya itu mengumpulkan uang secara susah payah di rantau. Ketentuan gadai ditebusi jual dipalalui ini dikuatkan oleh yurisprudensi Mahkamah Agung.

Dari uraian-uraian itu jelaslah bahwa tujuan pemerintah dalam menghapuskan gadai adalah untuk menolong si miskin dan menghindarkan terjadinya penghisapan manusia oleh manusia. Tetapi tampaknya ada satu hal yang terlupa bahwa orang melakukan gadai karena terdesak oleh kebutuhan akan uang. Jadi situasilah yang menyebabkan masyarakat melalui gadai. Selanjutnya mengenai masalah gadai ini bapak Sjahmunir A.M, SH. mengatakan bahwa kemudian gadai dihapuskan dalam segala bentuknya, akan tetapi jalan keluarnya tidak ada, sehingga timbul masalah kemana orang mencari uang dalam waktu yang singkat. Salah satu cara yang ada adalah dengan cara meminjam kepada pihak Bank. Pihak Bank kemudian akan meminta jaminan berupa sertifikat tanah, dan kita semua tahu kalau sebagian besar tanah di Minangkabau tidak disertifikatkan, sehingga hal ini menimbulkan masalah.

Dari penelitian-penelitian yang telah dilaksanakan ditemukan apa yang dinamakan sebagai salangpinjaman atau pinjam meminjam. Ini merupakan praktek gadai berselimut yang menghilangkan kata gadai. Dalam prakteknya serupa dengan praktek rentenir, dimana jumlah uang yang seharusnya diberikan untuk menebus barang jaminan jauh lebih besar dari jumlah uang yang diterima. Akan tetapi karena keadaan yang mendesak maka hal tersebut dilakukan juga.

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian di atas adalah, perlunya ditinjau kembali praktek gadai tanah yang merupakan tindak lanjut dari peraturan agraria di wilayah Sumatera Barat. Hal ini disebabkan karena ketentuan Undang-Undang tersebut bersifat memaksa. Situasi dan kondisi orang yang melakukan gadai di Sumatera Barat berbeda dengan situasi dan kondisi orang yang melakukan gadai di Pulau Jawa.

Permasalahan lain yang dapat dikemukakan di sini adalah dengan adanya ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan itu menetapkan bahwa semua tanah harus didaftar. Ketentuan inipun diberlakukan terhadap tanah ulayat Minangkabau. Tanah ulayat yang sudah di ganggam bauntuak pagang bamasiangkan dapat dikonversi melalui pendaftaran menjadi hak milik Indonesia. Hanya saja perlu untuk diperhatikan bahwa tanah tersebut disertifikatkan oleh penghulunya dan dibuat untuk dan atas nama kaum atau suku sebagai kepunyaan bersama. Dalam prosedur pendaftaran tanah ulayat dinyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah yang diterima secara turun temurun. Hal tersebut perlu dinyatakan secara tegas dalam permohonan sehingga dapat dicegah terjadinya pemilikan perorangan. Dalam permohonan pendaftaran tanah ulayat biasanya harus disertakan ranji atau silsilah dari keluarga yang memiliki tanah ulayat tersebut. Jadi dengan demikian dapat dilihat bahwa pensertifikatan tanah ulayat di Minangkabau tidak menyebabkan terciptanya hak milik perorangan atau individu atas tanah ulayat, karena hak miliknya tetap menjadi kepunyaan bersama dari masyarakat hukum adat.

Dalam kenyataannya yang terjadi, banyak orang yang beranggapan bahwa U.U.P.A dan P.P 10/1961 mengkeping-kepingkan tanah untuk kepentingan pribadi-pribadi. Hal itu antara lain terjadi karena banyaknya penyalahgunaan yang dilakukan oleh para penghulunya atau anggota-anggota kaum terutama yang sudah punah. Mereka mengkeping-kepingkan tanah dalam arti menjualbelikannya, atau ada penghulunya yang mensertifikatkan tanah ulayat atas nama pribadinya. Untuk menghindari terjadinya hal-hal tersebut maka ketentuan dari P.P. 10/1961 itu harus diiramakan dengan ketentuan adat. Tanah ulayat utuh didaftarkan untuk dan atas nama kaumnya, dengan biaya bersama akan untuk kepentingan bersama. Dalam sertifikat disebutkan bahwa tanah tersebut misalnya kepunyaan suku A, atas nama suku A, dan untuk kepentingan bersama dari anggota suku A tersebut. Dalam buku tanahnya disebutkan siapa-siapa anggota suku tersebut, sehingga diharapkan tidak terjadi sengketa dikemudian hari. Oleh karena itulah perlunya disertakan ranji atau silsilah dalam permohonan pendaftaran tanah tersebut.

Kalau dilihat pelaksanaan dari ketentuan mengenai pendaftaran tanah ulayat di wilayah Sumatera Barat, tampaknya masih belum banyak terlaksana. Masih kurang dari sepuluh persen dari tanah ulayat di Sumatera Barat yang sudah disertifikatkan. Hal tersebut kemungkinan terjadi karena hal-hal berikut ini :

- a. Masyarakat yang belum menyadari pentingnya dilakukan pendaftaran tanah ulayat mereka.
- b. Masalah besarnya biaya pendaftaran yang harus dikeluarkan.

- c. Masih kurangnya tenaga ahli yang merupakan tenaga pelaksana dari pendaftaran tanah tersebut.

Tujuan dari ketentuan-ketentuan tersebut sebenarnya baik, akan tetapi karena dalam pelaksanaannya masih belum sempurna sehingga menurut data dan fakta yang kami peroleh, pendaftaran tanah ulayat masih belum banyak terlaksana. Dengan melihat hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa ketentuan UUPA mengenai pemilikan tanah secara individu tidak sejalan dengan ketentuan tanah ulayat Minangkabau. Tanah ulayat Minangkabau bertujuan untuk keutuhan masyarakat Minangkabau yang juga berarti keutuhan dari tanah ulayat Minangkabau yang merupakan salah satu faktor yang mempersatukan orang Minangkabau.

Perkembangan zaman dan masyarakat ternyata juga membawa pengaruh dalam pengaturan tanah ulayat Minangkabau. Akan tetapi perubahan tersebut tidak terjadi dalam waktu singkat. Perubahan tersebut terjadi secara berangsur-angsur dan dalam jangka waktu yang lama, sehingga tidak terasa sejalan dengan perkembangan zaman. Sekarang dapat dilihat orang yang berasal dari luar Minangkabau dapat membeli tanah walaupun menurut ketentuan adat, tanah ulayat tidak dapat diperjual belikan. Hal itulah yang merupakan akibat dari evolusi tersebut, dimana sudah banyak orang yang tidak memperhatikan ketentuan adat. Akan tetapi syukurlah tampaknya hal tersebut hanya terjadi di kota-kota besar saja, dan jumlah kota besar di wilayah Sumatera Barat tidak seberapa jika dibandingkan dengan luas daerahnya. Sedangkan di desa-desa tampaknya orang masih banyak yang memegang norma adat tersebut. Menurut ketentuan adat, orang yang berasal dari luar Minangkabau tidak

bisa membeli tanah, karena menurut ketentuan adat sendiri, orang yang datang tersebut harus diberi tanah, akan tetapi penggunaannya terbatas sebagai hak pakai saja.

Ketentuan tersebut hanya berlaku terhadap tanah ulayat. Untuk tanah-tanah bekas hak Barat yang ada di kota, ketentuan tersebut tidak berlaku. Sebelum berlakunya UUPA, ketentuan hukum tanah yang berlaku adalah untuk kepentingan orang-orang yang tunduk pada Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda. Untuk orang pribumi tidak ada jaminan mengenai hukum tanahnya. Perombakan dari hukum tanah Belanda menyatu dalam Undang-Undang Pokok tentang tanah yang bersumberkan pada hukum adat. Selanjutnya akan dibicarakan mengenai keperluan tanah bagi kepentingan pembangunan di wilayah Sumatera Barat. Pembangunan yang dilakukan di Sumatera Barat banyak memerlukan tanah. Jika tanah ulayat diperlukan guna kepentingan pembangunan, pada dasarnya tidak ada keberatan dari pihak masyarakat. Pada umumnya baik anggota masyarakat yang bersangkutan maupun para mamak kepala waris, penghulu-penghulu adat memperbolehkan tanah ulayat dipergunakan untuk keperluan pembangunan. Dalam hal ini tentu harus ada persetujuan dari masyarakat bersangkutan. Izin penggunaan tanah ulayat untuk pembangunan ini tidak hanya terbatas pada tanah-tanah ulayat yang belum digarap, akan tetapi termasuk juga tanah-tanah ulayat yang sudah digarap, baik itu yang berupa sawah maupun ladang penduduk.

Penting untuk diperhatikan disini bahwa dalam rangka penggunaan tanah ulayat untuk pembangunan perlu diadakan pendekatan dengan pihak masyarakat. Jika

pendekatan dilakukan dengan baik, maka tidak jarang masyarakat menyerahkan tanah ulayat tersebut secara sukarela guna kepentingan pembangunan tersebut, jika proyek yang dilaksanakan dirasakan besar manfaatnya bagi mereka. Untuk hal ini hendaknya jangan dilakukan pemaksaan, karena akan menghambat upaya pembangunan tanah ulayat untuk kepentingan pembangunan.

Disamping pemberian secara sukarela, ada pula yang disertai dengan pemberian ganti kerugian yang besarnya disepakati oleh pihak pemerintah dan masyarakat. Dan karena proyek yang dilaksanakan adalah proyek pemerintah guna kepentingan umum, maka sudah barang tentu ganti kerugian yang diberikan tidak terlalu besar. Sebenarnya masalah ganti kerugian tersebut langsung diberikan kepada masyarakat melalui mamak kepala warisnya.

Lain halnya jika pembangunan itu dalam hubungan untuk usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak swasta dalam rangka penanaman modal, baik domestik maupun asing, masalah ganti kerugian akan menonjol ke depan. Mengenai penanaman modal ini ada sedikit hambatan. Ada isue dari para penanaman modal yang mengatakan bahwa tanah ulayat itu menghambat pelaksanaan penanaman modal di wilayah Sumatera Barat. Hal tersebut disebarluaskan sehingga investor enggan untuk menanamkan modalnya. Setelah diadakan pembuktian, ternyata hal tersebut tidak terbukti. Sebenarnya tanah ulayat itu paling mudah didapatkan guna kepentingan pembangunan, sesuai dengan fungsi tanah ulayat itu untuk kepentingan bersama. Akan tetapi dalam hal mendapatkannya inilah merupakan faktor penghambat. Hal ini disebabkan karena para investor ingin cepat saja mendapatkan tanah yang

diperlukannya, sedangkan mereka tahu bahwa tanah ulayat itu adalah kepunyaan bersama dari masyarakat hukum adat. Jadi sebenarnya pendekatan dengan masyarakatlah yang kurang baik, sehingga masalah ini yang menimbulkan kasus dalam pemakaian tanah guna kegiatan penanaman modal. Akan tetapi bukan tidak mungkin tanah ulayat itu mendorong kegiatan pembangunan. Sebagai contoh yang dapat dikemukakan disini adalah proyek transmigrasi Sitiung yang banyak menggunakan tanah ulayat masyarakat. Proyek-proyek lain seperti pembangunan jalan umum, pasar, masjid, rumah sakit dan lain-lain menggunakan tanah ulayat. Jadi dari kenyataan yang ada tersebut dapat disimpulkan bahwa sejauh yang menunjang pembangunan pemerintah tidak terdapat masalah-masalah yang memerlukan penanganan serius, asalkan pendekatan yang dilakukan secara tepat dan dimusyawarahkan dengan para penghulu dan pemegang tanah ulayat itu sendiri.

Selanjutnya akan ditinjau ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1960 yang mengatur mengenai bagi hasil tanah pertanian. Dari ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut dapat dilihat, bahwa tujuan yang hendak dicapai adalah baik, yakni agar para penggarap dapat tertolong dan pemilik tanah memberikan persayaratan lunak bagi para penggarap. Ternyata ketentuan dari Undang-Undang tersebut tidak dapat diterapkan pelaksanaannya di Sumatera Barat, karena disini yang namanya memperduai atau bagi hasil biasanya dengan perbandingan $\frac{2}{3}$ untuk penggarap $\frac{1}{3}$ bagian untuk pemilik tanah. Biasanya dalam praktek jika antara penggarap dan pemilik tanah ada hubungan keluarga maka besarnya hasil tanah itu hanya formalitas saja. Pemilik hanya diberi bagian

sekedarnya saja, karena yang mengerjakan bukan orang lain. Undang-undang tersebut tampaknya baik jika dilakukan terhadap praktek bagi hasil di Pulau Jawa karena penduduknya banyak, dan ikatan kekeluargaannya tampaknya tidak seerat ikatan kekeluargaan masyarakat di Minangkabau. Apabila ketentuan tersebut diberlakukan di Minangkabau dalam penggarapan tanah, maka akan dirasakan menguntungkan pemilik tanah dan merugikan penggarap tanah sehingga ketentuan tersebut tidak dilaksanakan oleh masyarakat.

Dengan melihat kenyataan-kenyataan yang ada yang telah dikemukakan dalam Bab IV ini, maka secara jujur dapat dikatakan bahwa beberapa peraturan pemerintah dibidang pertanahan ada yang tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan adat Minangkabau yang mengatur masalah pertanahan terutama tanah ulayat. Dengan adanya kenyataan tersebut maka dapat dilihat bahwa banyak peraturan-peraturan pemerintah dibidang pertanahan yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik, karena masyarakat Minangkabau masih tetap menerapkan ketentuan hukum adat mereka dalam hal pengaturan tanah, terutama dalam hal tanah ulayat. Walaupun di bidang hukum kekeluargaannya terlihat sudah mulai ada perubahan-perubahan, seiring dengan perkembangan zaman dan masyarakat, akan tetapi ternyata dalam hal tanah ulayat ini masyarakat masih tetap memberlakukan ketentuan adat mereka. Sebenarnya tujuan dari peraturan-peraturan pemerintah di bidang keagrariaan itu adalah baik, guna mewujudkan terciptanya kepastian hak dan kepastian tersebut ingin membagi-bagi tanah menjadi individu-individu, maka ketentuan tersebut tidak dapat dilaksanakan terhadap tanah ulayat Minangkabau, yang menginginkan tanah ulayat

tetap untuk menjadi kepunyaan bersama. Oleh karena itu walaupun di dalam UUPA diakui keberadaan hukum adat, maka dalam pembentukan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya hendaknya diperhatikan pula ketentuan-ketentuan hukum adat dari masyarakat di Indonesia, mengingat Indonesia terdiri dari beragam suku yang memiliki hukum adat yang berbeda-beda, sehingga ketentuan tersebut dapat dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia,

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab di muka maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Dalam sistem kekerabatan masyarakat Minangkabau telah terjadi perkembangan ke arah susunan baru. Perkembangan tersebut tidak bersifat mengikis habis susunan adat lama, akan tetapi hanya memberikan isi dan nilai baru. Perkembangan ke arah susunan baru itu antara lain dapat dilihat pada hubungan antara mamak dan kemenakannya. Dahulu, hubungan ini sangat erat, karena mamak bertanggung jawab atas kehidupan kemenakannya. Tetapi hubungan tersebut sekarang sudah semakin merenggang. Dewasa ini, seorang ayah telah memberikan tanggung jawab yang besar kepada istri dan anak-anaknya, baik secara moril maupun secara materiil. Hingga dewasa ini hubungan antara mamak dan kemenakannya masih terlihat, hanya saja hubungan tersebut sudah tidak seerat dahulu lagi, sehingga berakibat terhadap pelaksanaan penguasaan dan pemamfaatan tanah pusaka yang berasal dari tanah ulayat, dimana sekarang tanah ulayat tersebut telah banyak yang dimiliki secara pribadi, dan lepas dari pengawasan Penghulu dan mamak.

Mengenai pengaturan harta pusaka yang berbetuk tanah yang berasal dari hak ulayat, dalam masyarakat hukum adat Minangkabau, walaupun dalam kehidupan sehari-hari. susunan dan sistem kekerabatan telah menunjukkan perkembangan sesuai

dengan perkembangan jaman, akan tetapi dalam hal-hal yang berhubungan dengan harta pusaka, yang di dalamnya tercakup pula masalah tanah ulayat, masyarakat Minangkabau masih menyerahkan penyelesaiannya pada ketentuan adat. Dari uraian-uraian tersebut dapat dilihat bahwa walaupun telah terjadi perkembangan ke arah susunan baru, susunan yang lama masih belum habis dan masih tetap digunakan oleh masyarakat Minangkabau. Perkembangan baru tersebut hanya memberikan unsur-unsur baru terhadap pelaksanaan adat Minangkabau dan tidak menghapus ketentuan lama secara keseluruhan.

Dalam hal penggunaan tanah ulayat Minangkabau untuk kepentingan pembangunan di wilayah Sumatera Barat, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah, memerlukan penanganan yang serius, guna menghindari konflik-konflik di internal masyarakat sendiri maupun masyarakat dengan pemerintah. Hal penting yang juga perlu diperhatikan dalam usaha mendapatkan tanah ulayat itu adalah perlunya diadakan pendekatan-pendekatan dengan tokoh-tokoh masyarakat baik formal maupun informal, serta pemilik tanah ulayat tersebut. Perlu atau tidaknya pemberian ganti kerugian, tergantung kepada kesepakatan antara pihak masyarakat pemilik tanah dengan pihak pemerintah. Di samping itu, masalah ganti kerugian itu tergantung kepada kepentingan apa yang diselenggarakan dalam pembangunan yang dilaksanakan itu. Jika kegiatan pembangunan tersebut untuk kepentingan umum dan manfaatnya dirasakan langsung oleh pemilik ulayat itu, maka tidak jarang mereka memberikan tanahnya secara cuma-cuma. Atau bisa juga jumlah ganti kerugian yang

mereka terima tidak sebesar ganti kerugian dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pihak swasta yang bersifat komersil.

5.2. Saran

Dengan melihat kesimpulan-kesimpulan di atas serta memperhatikan masalah-masalah yang dibahas pada bab terdahulu, maka kami dapat memberikan saran-saran yang kiranya dapat digunakan dalam rangka pengaturan tanah ulayat di wilayah Sumatera Barat yang meliputi :

1. Agar supaya dalam waktu yang tidak begitu lama dapat dibuat suatu peraturan daerah, untuk mengatur peraturan, pemakaian dan penggunaan tanah ulayat. Dengan demikian pengkotak-kotakan tanah menjadi milik pribadi yang selama ini dikhawatirkan tidak akan berkembang dan dapat diatasi. Penulis rasa alangkah baiknya jika dibuat suatu peraturan daerah untuk mengatur atau mengikat pemerintah dan masyarakat hukum adat Minangkabau tentang penggunaan dari tanah ulatnya. Apabila status nagari sudah diakui oleh Perda No. 12 Tahun 1983, maka alangkah baiknya jika ulayatpun diakui dengan suatu peraturan daerah.
2. Dalam masalah penggunaan tanah ulayat untuk kepentingan pembangunan, hendaknya dalam usaha-usaha untuk memperolehnya, dilakukan pendekatan dengan pemiliknya, dengan memperhatikan prinsip musyawarah dan mufakat, dan dengan mengingat bahwa kepentingan negara, kepentingan nasional dan kepentingan umum harus diutamakan. Sehubungan dengan kepentingan ini, maka Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga permusyawaratan dan permufakatan adat

tertinggi, yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat di tengah-tengah masyarakat nagari di Sumatera Barat dapat dimanfaatkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Amran, Rusli. 1981. *Sumatra Barat Hingga Plakat Panjang*. Sinar Harapan : Jakarta.
- Ali Umar, Tasyarif dan Faisal Hamdan. 1977-1978. *Adat dan Lembaga-lembaga Hukum Adat Daerah Sumatra Barat*. Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Andalas : Padang.
- Anwar Chairul. 1967. *Meninjau Alam Minangkabau*. Segara : Jakarta.
- Bahri, Syamsul. 1979. *Pendaftaran Tanah Ulayat, Transaksi dan Hukum Pertanggungjawaban Atas Tanah*. Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Andalas : Padang.
- _____, dan Sjoefyan Thalib. 1977. *Pengaruh Undang-Undang Pokok Agraria Terhadap Tanah Adat di Sumatera Barat*. Simposium Undang-Undang Pokok Agraria dan Kedudukan Tanah-tanah Adat Dewasa ini. Bina Cipta : Jakarta.
- Harsono, Boedi, 2002. *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*. Penerbit Universitas Trisaksi : Jakarta.
- _____. 1997. *Hukum Agraria Indonesia*, Jilid I, Djambatan : Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman. 1987. *Hukum Kekerabatan Adat*. Fajar Agung : Jakarta.
- Hermayulis. 1999. *Penerapan Hukum Pertanahan dan Pengaruhnya Thread Hubungan Kekerabatan pada Sistem Kekerabatan Matrilineal Minangkabau di Sumatera Barat*. Disertasi. UI : Jakarta.
- Mardalis. 1999. *Metode Penelitian*. PT. Bumi Aksara.
- Muhammad, Bushar. 1981. *Asas-asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*. Pradnya Paramita : Jakarta.
- Moleong, L. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Nasution, S. dan Thomas, M. 2000. *Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi, Makalah*. PT Bumi Aksara : Jakarta.

- Navis, A.A. 1983. *Dialektika Minangkabau Dalam Kemelut Sosial dan Politik*. Penerbit Genta Singgalang Press : Padang.
- Naim, Mochtar. 1968. *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Warisan Minangkabau*. Center for Minangkabau Studies Press : Padang.
- Pelajaran Adat Minangkabau. 1987. *Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau* : Padang.
- Poloma, Margaret M. 1994. *Sosiologi Kontemporer*. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Sugiono. 2002. *Statistik Untuk Penelitian*. CV. Alfa Beta. Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia Press : Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Soleman B. Taneko . 1983. *Hukum Adat Indonesia*. Rajawali : Jakarta.
- Soebekti, R. 1974. *Hukum Adat Indonesia Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*. Alumni : Bandung.
- Sudiyat, Iman. 1983. *Ikhtisar Hasil Studi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dewasa Ini*. Fakultas Universitas Gajah Mada : Yogyakarta.
- _____. 1981. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Liberty : Yogyakarta.
- _____. 1980. *Beberapa Masalah Pertanahan di Wilayah Pedesaan*. Fakultas Hukum Universitas Airlangga : Surabaya.
- Thalib, Sajuti. 1985. *Hubungan Tanah Adat dengan Hukum Agraria di Minangkabau*. Bina Aksara : Jakarta.
- Westenenk. L. C. 1969. *De Minangkabau Nagari*. Senat Mahasiswa Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Andalas : Padang.
- Yurisprudensi Sumatera Barat. 1977. *Pengadilan Tinggi Sumatera Barat – Riau dan Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Andalas* : Padang.

B. Peraturan/Majalah

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatra Barat Nomor 13 Tahun 1983 tentang Nagari sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat. Biro Bina Pemerintahan Desa Kantor Gubernur Daerah Tingkat I Sumatera Barat. : Padang.

Majalah Ilmiah Fakultas Universitas Diponegoro. *Masalah-Masalah Hukum*. Vol. XXXI No. 2 April – Juni 2002.